

LAPORAN *INTERNSHIP*

**PERAN PERKUMPULAN IDEAMENINGKATKAN PARTISIPASI
KELOMPOK MARGINAL DAN TRANSPARANSI ANGGARAN PADA
PROSES PEMBANGUNAN**

DOSEN PEMBIMBING

FX. Bambang Kusumo Prihandono, M.A.



Disusun Oleh :

Nama : Ferina Anistya Fabriningrum

NPM : 121004841

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2017

LAPORAN *INTERNSHIP*

**PERAN PERKUMPULAN IDEA MENINGKATKAN PARTISIPASI KELOMPOK
MARGINAL DAN TRANSPARANSI ANGGARAN PADA PROSES
PEMBANGUNAN**

Oleh

Nama : Ferina Anistya Fabriningrum

NIM : 121004841

Menyetujui

Dosen Pembimbing *Internship*



FX. Bambang Kusumo Prihandono, M.A.

LAPORAN *INTERNSHIP*

**PERAN PERKUMPULAN IDEA MENINGKATKAN PARTISIPASI KELOMPOK
MARGINAL DAN TRANSPARANSI ANGGARAN PADA PROSES
PEMBANGUNAN**

Oleh

Nama : Ferina Anistya Fabriningrum

NIM : 121004841

Telah diseminarkan di depan tim penguji

Pada 3 maret 2017

Susunan Tim Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Penguji I

FX. Bambang Kusumo Prihandono, M.A.



Penguji II

Y. Kunharibowo, M.A.

.....

.....

PENGANTAR

Laporan *internship* ini merupakan hasil dari kerja mahasiswi selama proses *internship* yang berlangsung pada 29 Februari – 28 April 2016. Saya melaksanakan kerja selama empat puluh hari kerja, di Perkumpulan Idea. Laporan *internship* memuat tentang latar belakang penulis, deskripsi kerja, pelaksanaan *internship*, dan refleksi atas pelaksanaan proses *internship*. Proses *internship* belajar untuk mengetahui proses kerja, berkoordinasi dan meningkatkan kedisiplinan yang diperoleh saat melakukan *internship*.

Aplikasi perkuliahan yang diperoleh dari semester satu sampai semester tujuh diterapkan saat saya melakukan *internship*, saat di kantor maupun di lapangan. Terimakasih kepada Program Studi Sosiologi Atma Jaya Yogyakarta dengan Kepala Program Studi Bapak Bambang Kusumo Prihandono. Berkat persetujuan proposal *internship*, saya berkesempatan mengikuti program *internship* di Perkumpulan Idea. Terimakasih kepada Perkumpulan Idea, beserta jajarannya yakni: Bapak Sunarja selaku Direktur Pelaksana, Ibu Tenti Novari Kurniawati selaku Deputy Pengembangan Program, Ibu Triwahyuni Suci Wulandari selaku Deputy Pengelolaan Pengetahuan, staff Program, staff Administrasi dan Keuangan.

Terimakasih atas waktu dan bimbingan yang telah diberikan oleh Bapak Bambang Kusumo Prohandono selaku dosen pembimbing. Terimakasih kepada Bapak Y. Kunharibowo yang telah bersedia menjadi dosen penguji *internship* pada 3 Maret 2017. Terimakasih untuk teman-teman Program Studi Sosiologi Universitas Atma Jaya, khususnya pada teman-teman yang selalu mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan laporan *internship*.

Yogyakarta, 3 Maret 2017

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II PROFIL LEMBAGA | 7 |
| Sejarah Perkumpulan Idea Yogyakarta | 7 |
| Visi dan Misi | 8 |
| Isu strategis Perkumpulan Idea | 8 |
| Program Strategis | 8 |
| Tujuan Strategis | 9 |
| Prinsip-prinsip yang dianut Idea | 9 |
| Mandat | 10 |
| Target Kelompok dan Wilayah Kerja | 11 |
| Fokus Isu | 11 |
| Layanan Lembaga | 12 |
| Sumber Pendanaan Idea | 13 |
| Mitra Idea | 13 |
| Struktur Organisasi | 15 |
| BAB III PELAKSANAAN <i>INTERNSHIP</i> | 16 |
| A. Deskripsi Tugas dan Pelaksanaan <i>Internship</i> | 16 |
| B. Refleksi | 34 |
| BAB IV PENDAHULUAN | 42 |
| DAFTAR PUSTAKA | 45 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *internship* adalah salah satu mata kuliah dengan 4 sks yang wajib ditempuh oleh mahasiswa/i dan merupakan salah satu syarat menyelesaikan program studi Sosiologi pada Strata 1 (S1). *Internship* adalah kesempatan untuk dapat mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari lembaga pendidikan ke dalam pengalaman kerja. Hal tersebut diperoleh dengan cara berpartisipasi dalam suatu pekerjaan yang terencana dan terawasi.

Program *internship* memberikan kesempatan bagi mahasiswi untuk bekerja dalam organisasi profit dan non-profit sebagai bagian dari proses pembelajaran. Program *internship* diharapkan dapat membuat mahasiswi mengaplikasikan pengetahuan sosiologi yang diperoleh di kelas pada proses pekerjaannya. Melalui pengalaman *internship*, mahasiswi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah, kemampuan bekerja dalam tim, serta mengembangkan ketrampilan-ketrampilan praktikal dan fungsional (*soft-skills*) yang dibutuhkan dunia kerja. *Internship* ini dapat berupa kerja penelitian dan atau kerja magang pada berbagai lembaga: pemerintahan, bisnis, penelitian, swadaya masyarakat yang sesuai dengan lingkup Sosiologi.

Mahasiswi telah menyelesaikan masa *internship* selama 40 hari kerja di lembaga non profit yang bergerak pada bidang advokasi anggaran, yaitu *Institute for Development and Economic Analysis* (IDEA). Perkumplan IDEA dipilih menjadi tempat mahasiswi melaksanakan program *internship* dengan alasan, bahwa Perkumpulan IDEA merupakan lembaga swadaya masyarakat yang sesuai dengan lingkup sosiologi. Perkumpulan IDEA sebagai lembaga advokasi memiliki visi dan misi untuk dapat mendorong pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga melalui perubahan kebijakan, penguatan basis, dan peningkatan kesadaran publik. Program yang menjadi perhatian dari IDEA salah satunya adalah kelompok marginal.

Pada tahun 2011, Indonesia meratifikasi UNCPRD (*United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) melalui UU No. 19 tahun 2011. UNCPRD merupakan kovenan PBB tentang penghormatan dan perlindungan hak-hak difabel. Dengan ratifikasi tersebut artinya, bangsa Indonesia telah bersepakat untuk mengikat diri dalam kesepakatan internasional untuk mengambil langkah-langkah yang nyata dalam rangka memberikan jaminan atas penghormatan dan perlindungan hak difabel.

Sejak diratifikasi tahun 2011 sampai sekarang masih banyak terjadi kebijakan dan pelayanan kepada kaum difabel yang sarat dengan perilaku yang kerap mereduksi, mengeliminasi, dan mendekonstruksi ruang politik kaum difabel. Setiap tahun pemerintah, mengeluarkan program dan kegiatan bagi upaya pembinaan penyandang disabilitas menuju taraf kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri. Upaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas masih didominasi oleh *charity based*, padahal gerakan advokasi pemberdayaan kaum difabel telah memasuki model *rights based*.¹

Pada level daerah, ada beberapa daerah yang telah mengeluarkan peraturan daerah sebagai aturan turunan dari UU No. 19 tahun 2011, salah satunya adalah DIY. Tahun 2012, DIY telah mengesahkan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Peraturan Daerah tersebut mewajibkan Pemerintah DIY untuk menerapkan prinsip-prinsip UNCPRD dalam pengambilan kebijakan dan program di DIY, diantaranya adalah mengenai memenuhi hak para penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh pemerintah melalui program dan kegiatan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Kegiatan yang dilakukan masih banyak bersifat bantuan sosial dan masih terbatas di SKPD tertentu seperti Dinas Sosial, Dinas pendidikan dan Dinas kesehatan. Alokasi anggaran untuk penyandang disabilitas di Dinas Sosial masih dimasukkan dalam program penyandang masalah sosial atau kesejahteraan sosial, padahal kelompok difabel tidak sama dengan penyandang masalah sosial. Program yang diberikan juga

¹ Proposal kegiatan Proposal IDEA – HI Periode program 4 bulan (Desember 2014 – Maret 2015) Penguatan Kapasitas Organisasi Penyandang Disabilitas

tidak banyak menjawab persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan saat penyusunan program, kelompok disabilitas tidak pernah dilibatkan.

Salah satu indikator untuk mengukur keberpihakan Negara adalah melalui kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran adalah ranah strategis untuk mengukur seberapa jauh pemenuhan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi warga Negara tercapai. Dari dokumen anggaran yang ada selama ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota di DIY masih belum cukup dalam mengalokasikan anggaran untuk kelompok difabel.

1.2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan *Internship*

Berdasarkan pemaparan di atas, mahasiswi mengambil tema dalam pelaksanaan *internship*, yaitu: Peran *Institute for Development and Economic Analysis* (IDEA) Sebagai Lembaga Advokasi dalam Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Penyandang Disabilitas. Berdasarkan tema tersebut, mahasiswi ingin mengetahui program-program kerja Perkumpulan IDEA dalam mengadvokasi pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya penyandang disabilitas.

Pada saat penentuan program kerja, mahasiswi memilih program *Advocating for Changes* (AFC). Program dengan tema penguatan kapasitas organisasi penyandang disabilitas, program tersebut kerjasama antara HI, IDEA, dan Ciqal. Hal ini mendorong mahasiswi untuk mempelajari serta membantu IDEA dalam program kerja yang memiliki fokus pada penyandang disabilitas. Mahasiswi tidak hanya terlibat di satu program kerja IDEA. Mahasiswi dapat mengikuti berbagai kegiatan IDEA, diluar fokus kajian *internship*. Mahasiswi diberikan kesempatan menambah wawasan dengan mengikuti berbagai kegiatan diskusi dan seminar dengan jejaring IDEA yang berkaitan program kerja IDEA.

Waktu yang ditentukan ketika mahasiswi menyusun proposal dan rencana awal melakukan *internship* adalah:

| No | Kegiatan | Tahun 2015-2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|
| | | Februari | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | |
| | Minggu ke- | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pra Survei Tempat <i>Internship</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Penyusunan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Bimbingan & Revisi Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Pengajuan Proposal kepada Kaprodi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Pengajuan Proposal kepada IDEA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Pelaksanaan <i>Internship</i> * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Pembuatan Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pada saat pelaksanaan *internship* ada perubahan waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana awal melakukan *internship*. Hari pertama mahasiswi melakukan *internship* adalah diminggu keempat bulan Februari yaitu pada Senin, 29 Februari 2016. *Internship* berakhir pada minggu ketiga dibulan April 2016, tetapi karena ada beberapa hari libur nasional dan keperluan pribadi yang mengharuskan mahasiswi meminta izin untuk tidak masuk, maka terjadilah perubahan waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana awal. Perubahan waktu pelaksanaan tertera di dalam catatan harian.

1.3. Tujuan dan Manfaat *Internship*

Pelaksanaan Program *Internship* ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Dari segi manfaat, diharapkan dapat berguna bagi lembaga, pembaca laporan kegiatan *internship* ini dan bagi penulis sendiri. Sedangkan tujuan program ini dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

1. Tujuan Praksis

- a. Mahasiswi dapat memahami makna kerja, lingkungan, dan proses kerja di lembaga *Institute for Development and Economic Analysis* (IDEA).
- b. Mahasiswi dapat memahami keterkaitan dan relevansi ilmu pengetahuan yang diperoleh di kelas dengan mengaplikasikan di dunia kerja.
- c. Mahasiswi dapat memperluas wawasan praksisnya dan mengembangkan ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.

2. Tujuan Akademis

Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar di luar kampus serta dapat mengasah kemampuan bekerja dalam sebuah tim di sebuah perusahaan, organisasi, lembaga swasta dan sebagainya. Dengan program ini, mahasiswa telah memenuhi salah satu syarat Program Studi Sosiologi tentang program *internship*.

1.4. Tujuan Penulisan Laporan *Intenrship*

Penyusunan laporan *internship* memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan administratif perkuliahan, agar mahasiswa dapat melangkah ke jenjang akhir masa perkuliahan. Memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait seperti dosen, teman-teman satu angkatan, adik kelas mengenai proses *internship* yang dijalani mahasiswa. Laporan *internship* diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan berada pada tahap penyusunan laporan *internship*.

Penulisan laporan memberikan gambaran mengenai hal yang dipelajari dan dikerjakan mahasiswi selama melakukan proses *internship*. Laporan *internship* menjadi media mahasiswa untuk dapat membagikan manfaat yang diperoleh ketika melakukan *internship*, diantaranya:

1. Memperoleh pengalaman kerja, khususnya pada program kerja *Advocating for Changes* (AFC) yang dikelola oleh IDEA, program kerja sama antara HI, IDEA, dan Ciqal.
2. Kegiatan *internship* dapat dijadikan sebagai media dalam mengaplikasikan keterampilan dasar yang diperoleh dan dipelajari selama proses kuliah.

3. Mempelajari proses kerja yang dilakukan oleh *supervisor* dan *staff-staff* lain yang ada di IDEA.
4. Mempelajari bagaimana IDEA menyelesaikan program kerja dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait program kerja seperti, pemerintah, mitra kerja, dan organisasi yang didampingi IDEA.

Laporan *internship* dibagi menjadi empat bab utama. Bab I memberikan pemaparan mengenai latar belakang dan tujuan dari penyusunan laporan. Bab II memberikan gambaran mengenai profil lembaga Perkumpulan IDEA. Bab III, memaparkan deskripsi mengenai tugas-tugas yang diterima oleh mahasiswi selama proses *internship*. Bab IV yang berisi mengenai kesimpulan dari susunan bab sebelumnya.

BAB II

PROFIL LEMBAGA



2.1. Sejarah Perkumpulan IDEA Yogyakarta

IDEA didirikan pada 20 Mei 1995 dan berbadan hukum pada 22 April 2004 (Akta No: 25/2004 Notaris Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum., Yogyakarta). Sesuai mandatnya, Perkumpulan IDEA didirikan sebagai bagian upaya mendorong pelebagaan mekanisme politik dan kebijakan publik yang menghormati HAM, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya.

IDEA sebagai organisasi non-pemerintah memutuskan untuk menjadi bagian transformasi sosial di Indonesia. Satu dekade terakhir ini, perubahan dramatis terjadi dalam tata pemerintahan di Indonesia sehingga menjadi lebih terbuka dan demokratis. Namun perubahan ini belum tentu menjamin akses kelompok-kelompok rentan terhadap sumber daya, karena pada saat yang sama, tarik-menarik kekuatan yang bekerja pada kebijakan publik di Indonesia tidak searah dengan kepentingan kelompok rentan.

IDEA menfokuskan energinya pada pendidikan populer dan advokasi kebijakan anggaran di tingkat pusat serta daerah. Kebijakan anggaran adalah kebijakan yang mengatur alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber-sumber daya publik. Dengan demikian maka kebijakan anggaran sangat strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan milenium, kesetaraan & keadilan gender, pengurangan risiko bencana atau pun untuk pemenuhan hak-hak dasar warga.

Kebijakan anggaran pada akhirnya menjadi kebijakan politik karena banyaknya pihak yang berkepentingan atas ketersediaan sumber daya publik yang terbatas. Untuk menjamin pemenuhan hak-hak asasi kelompok rentan, maka dibutuhkan sistem kebijakan anggaran yang deliberatif. Dorongan untuk pewujudan

kebijakan ini membutuhkan keberdayaan dan keterlibatan masyarakat sipil dalam kebijakan publik.

2.2. Visi dan Misi Perkumpulan IDEA Yogyakarta

A. Visi:

Terwujudnya kedaulatan rakyat di ranah publik yang ditandai oleh pemenuhan hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat.

B. Misi:

Mendorong proses-proses politik yang demokratis untuk pemenuhan hak-hak dasar warga melalui perubahan kebijakan, penguatan basis dan peningkatan kesadaran publik.

2.3. Isu Strategis IDEA

IDEA mendedikasikan diri pada kerja-kerja advokasi anggaran yang dalam 3 tahun ke depan akan mendorong dan tidak tak terbatas pada isu :

1. Mendorong tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel yang mencakup pada pengelolaan pendapatan negara dan anggaran pelayanan publik untuk di tingkat desa, Kab/Kota, Provinsi serta Nasional.
2. Mendorong pengarusutamaan hak ekonomi, sosial dan budaya, perlindungan kelompok gender minoritas, pengurangan kemiskinan, serta pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
3. Meningkatkan keragaan IDEA sebagai pusat pengelolaan pengetahuan dan informasi advokasi tata kelola anggaran.
4. Mewujudkan IDEA sebagai lembaga yang memiliki tata kelola organisasi masyarakat sipil yang baik.

2.4. Program Strategis

1. Penguatan kapasitas internal.
2. Advokasi isu-isu strategis untuk mengubah kebijakan di tingkat daerah dan pusat serta relasi keduanya.
3. Peningkatan kapasitas kelompok rentan.

2.5. Tujuan Strategis

1. IDEA menjadi lembaga yang kuat dengan ciri-ciri tanggung jawab sosialnya terhadap kelompok rentan terpenuhi, keberlanjutan sumber dayanya, kapasitasnya membaik sehingga menjadi rujukan bagi gerakan masyarakat sipil.
2. Meningkatnya kapasitas dan posisi tawar masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran.
3. Mampu mempengaruhi perubahan kebijakan di tingkat nasional dan daerah dalam isu-isu strategisnya.

2.6. Prinsip-prinsip yang dianut IDEA, adalah:

1. Akuntabilitas, dalam menjalankan misinya IDEA berpendirian bahwa segala keputusan, tindakan dan sikap harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis / moral dan secara hukum.
2. *Responsiveness*, untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang tinggi IDEA menganut pandangan bahwa terhadap korban, atau mereka yang potensial menjadi korban, harus bersikap tanggap untuk menghindari makin dalamnya akibat yang ditanggung korban atau mereka yang potensial menjadi korban. IDEA juga menganut pandangan tanggap terhadap perubahan situasi atau kecenderungan sehingga perubahan strategi dan pendekatan secara bertanggungjawab selalu dimungkinkan.
3. Transparansi, dalam meningkatkan rasa saling percaya dan saling pengertian IDEA menjunjung tinggi keterbukaan dan oleh karenanya selalu mengusahakan mekanisme keterbukaan sebagai prakondisi untuk mencapai akuntabilitas.
4. Partisipasi, agar dapat memajukan kepentingan kelompok marginal (kelompok rentan dan pemilik akses rendah) pelibatan mereka dalam proses pembuatan kebijakan harus dilakukan.
5. *Fairness*, untuk dapat menegakkan keadilan IDEA berpendirian bersikap fair harus diutamakan kepada semua pihak.
6. Proses yang demokratis, untuk mendorong adanya akuntabilitas, saling percaya dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan IDEA mengupayakan pelaksanaan prinsip-prinsip demokratis dalam semua proses pengambilan

keputusan strategis, penyusunan rencana kerja dan pengembangan kelembagaan.

7. Afirmatif, mengakui adanya ketimpangan relasi kuasa yang melekat, IDEA percaya bahwa tindakan-tindakan afirmatif harus diambil untuk mengoreksi ketimpangan yang ada.

2.7. Mandat

IDEA dimandatkan untuk mendorong pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya oleh negara melalui kebijakan anggaran publik, khususnya anggaran daerah. Nilai-nilai yang akan dianut IDEA dalam melakukan dan mengembangkan misinya adalah:

1. Keadilan, IDEA mengimani bahwa semua pihak, terutama kelompok rentan, harus diperlakukan secara *fair* sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan negara dan memajukan kepentingannya.
2. Kesetaraan gender dan keyakinan, IDEA percaya bahwa identitas gender dan keyakinan seseorang atau sekelompok orang tidak menjadi penghalang untuk diperlakukan secara adil, termasuk dalam memajukan kepentingannya. Dalam situasi di mana terjadi ketidaksetaraan yang melekat (secara struktural) IDEA memandang harus diupayakan koreksi.
3. Keberagaman (pluralisme), IDEA memandang bahwa oleh karena pada dasarnya manusia lahir dengan identitas biologis dan sosial yang berbeda maka segala daya-upaya pembangunan masyarakat harus merayakan (mengakui, menghormati dan membela) keberagaman sebagai bagian integral kehidupan sosial.
4. Nir-kekerasan, IDEA menganut pandangan bahwa pemajuan kepentingan kelompok harus dilakukan dengan cara-cara yang *fair* dan damai, serta menolak cara-cara kekerasan baik kekerasan dalam bentuk fisik maupun kekerasan struktural (relasi kuasa).
5. Imparsial, IDEA meyakini bahwa kebenaran dapat datang dan dibawa oleh siapapun dan dari mana pun. Oleh karena itu, keberpihakan IDEA adalah bukan pada kelompok tetapi pada kebenaran yang diusung. Namun demikian, menyadari adanya ketimpangan relasi sosial yang melekat pada masyarakat

(*embedded*) IDEA memilih untuk membela kepentingan kelompok-kelompok marginal bila dihadapkan pada pilihan atau dilema keberpihakan.

6. Keberlanjutan, IDEA meyakini bahwa segala upaya memajukan kepentingan kelompok marginal harus dilakukan secara menerus dengan orientasi jauh ke depan.

2.8. Target Kelompok dan Wilayah Kerja

1. Keberpihakan/kelompok dampingan : masyarakat marjinal, yaitu mereka yang tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar. Meliputi ; kelompok rentan miskin dan miskin, disabilitas, lansia dan anak.
2. Wilayah kerja : Lokal (Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi) dan Nasional.

2.9. Fokus Isu

Persoalan-persoalan yang ingin disasar IDEA adalah:

1. Kebijakan-anggaran yang tidak responsif gender, tidak peduli pada risiko bencana, dan tidak akuntabel.
2. Warga yang merupakan kelompok rentan tidak terorganisasi.
3. Masih rendahnya kapasitas warga, aparatur pemerintah dan anggota badan legislatif dalam mengikuti dan mempengaruhi kebijakan dan proses perencanaan dan penganggaran.
4. Proses penganggaran yang tidak partisipatif dan tidak transparan.

Ditinjau dari segi hak-hak sipil dan politik kebijakan dan proses penganggaran yang ada masih diwarnai:

- Apatisme warga atas mekanisme politik (perencanaan dan penganggaran) yang berlangsung
- Akses publik terhadap informasi publik masih minim
- Sistem sudah demokratis tetapi relasi-kuasa (*power relation*) masih didominasi oleh relasi patron-klien.
- Kelompok-kelompok rentan belum terlibat dalam proses politik.

Ditinjau dari segi hak-hak EKOSOB kebijakan dan proses penganggaran yang ada masih diwarnai:

- Ketimpangan akses terhadap sumberdaya publik
- Kecenderungan komodifikasi layanan hak-hak dasar (air, pangan, kesehatan dan pendidikan)
- Tidak ada pengakuan atas aset-aset komunitas (obat-obat tradisional, pengetahuan lokal)
- Ketimpangan penguasaan aset-aset ekonomi.

Intervensi yang dilakukan IDEA untuk menjawab persoalan-persoalan di atas pada intinya adalah mendorong proses-proses politik yang demokratis untuk pemenuhan hak-hak EKOSOB warga dan terutama kelompok rentan:

- Di arena kebijakan: melakukan advokasi kebijakan demi perubahan (melalui) kebijakan.
- Di arena akar rumput : melakukan pengorganisasian dan pendampingan kelompok-kelompok warga, dan membangun jejaring antar kelompok warga.
- Untuk menjembatani kedua arena di atas : mengembangkan riset, kampanye (*to raise public awareness*), mengembangkan dan melibatkan diri dalam jaringan, serta penguatan kapasitas aparatur negara dan pegiat *intermediary agencies* (pelatihan dan/atau *technical assistance*).

IDEA secara khusus memberikan perhatian lebih kepada pembuatan (materi muatan) dan/atau pelaksanaan (Rancangan) Peraturan Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Rancangan Undang-undang Desa, proses perencanaan dan penganggaran, dan integrasi isu gender, Penurunan Risiko Bencana, serta belanja sosial dalam perencanaan dan penganggaran.

2.10. Layanan Lembaga

1. Pengorganisasian, pendampingan dan peningkatan kapasitas kelompok warga
2. Pendidikan dan penguatan kapasitas
3. Riset dan/atau analisa kebijakan
4. Mengembangkan dan/atau melibatkan diri dalam jaringan

5. Mempengaruhi perubahan kebijakan (lobi, kampanye, dan melibatkan diri secara langsung)

2.11. Sumber Pendanaan IDEA

1. Iuran Anggota
2. Donor
3. Hibah Pegiat
4. Hibah IRC

2.12. Mitra IDEA

1. *Community based organization (CBO)* : Community Network of Kulon Progo District (JMKP / „Jaringan Masyarakat Kulon Progo“), Women's Group Network of Gunungkidul District (JKPGK / „Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul“), SRAWUnG Gunungkidul, People's Network of Bantul District (JARAK / „Jaringan Rakyat Bantul“), Community Network of Pacitan District (JMP / „Jaringan Masyarakat Pacitan“) which consist of the poor community members and women's groups, Forum Rakyat Kulon Progo (FRKP)CBO network in Kulon Progo District.
2. *NGOs* : several NGOs in Yogyakarta Special Region, several NGOs in East Java Province („Cakrawala Timur“ of Surabaya Municipality, „Narishakti“ of Jombang District, „KIBAR“ of Kediri District, „APEI“ of Lamongan District, „SBMI“ of Sumenep District, „SBMI“ of Probolinggo District), NGOs in Central Java Province („Formasi“ of Kebumen District, „Pattiro“ of Solo Municipality, „Arak Topeng“ of Semarang Municipality, „LBH“ of Semarang Municipality, „ORI“ of Kendal District, „Kompip“ of Solo Municipality), NGOs in West Java Province (The Grage Institute of Cirebon District, „BIGS“ of Bandung Municipality, „FPPM“ of Bandung Municipality, „Inisiatif“ of Bandung), NGOs in Jakarta („FITRA“, PATTIRO“, „CIBA“, „Lakspesdam NU“, ACE, „ASPPUK“), NGOs in Sumatera Region („Gerak“ of Aceh, „Sorak“ of Aceh, „Suak“ of Aceh, „Mataradja“ of Aceh, Women's Forum of Aceh, Women Solidarity of Deli Serdang District, „HAPSARI“ of Medan Municipality, „YPPR“ of Medan Municipality, „FPPK“ of Padang Municipality, „FA ABG“ of Padang Municipality, Koak“ of Lampung, „PRPN WCC“ of Bengkulu Municipality), NGOs in Kalimantan Region

(„Sanksi Borneo“ of Banjarmasin Municipality, „Gemawan“ Pontianak Municipality, „POKJA 30“ of Samarinda Municipality), NGOs in Sulawesi Region („FPMP“ of Makassar Municipality, „YASMIB Sulselbar“, „KPPA“ of Palu Municipality, „UPC“ of Palu Municipality, „Uplink“ of Kendari Municipality, „Perkumpulan Kelola“ of Sangihe District, „Yayasan Jambata“ of Donggala District), NGOs in West Nusa Tenggara Province („Somasi“, „Koslata“ of Lombok Region, „Konsepsi“ of Lombok Region, „LP2DER“ of Bima District, „Pancakarsa“ of Mataram Municipality, „YKSI“ of Mataram Municipality), NGOs in East Nusa Tenggara Province („Bengkel APPEK“, „PMPB“ of Kupang Municipality, „PIAR“, „FIRD“ of Ende, „Sankari“ of Flores, „WTM“ of Sikka District, „YBS“ of Lembata District), NGOs in Bali Province (Bali Corruption Watch, „Manikaya Kauci“ Foundation), NGOs in Papua Region („Jasoil“, „KOMPAK“, „TALI“, „PERDU“, „KIPRA“).

3. **Universitas** : Gadjah Mada University, Sunan Kalijaga Islamic State University, Airlangga University, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
4. **Local and international NGOs network** : IBP (International Budget Partnership), PWYP (Publish What You Pay) Indonesia, „GERAK“ of Indonesia (Indonesian People's Movement Against Corruption), Disaster Risk Reduction Forum of Yogyakarta Special Region, „Gender Working Group in Disaster“ in Yogyakarta Special Region, FITRA (Indonesian Forum on Budget Transparency), JPY (Yogyakarta Women Network), NGO Forum of Yogyakarta Special Region, Budget Advocacy Network, Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (JSTT), INFID, KMSTP (National Education Network).
5. **Donor Agencies** : Ford Foundation, OXFAM-GB, TIFA Foundation, RWI, European Union, Inpi-Pact, CSSP-USAID, Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI)/UNDP, Ausaid, LGSP-USAID, LOGICA-AUSAID, FON (Force of Nature), UNDP, UN OCHA, TAF, MRR melalui UNDP, TIFA melalui Artikel 33, Prorep melalui Artikel 33, Wide Web Foundation, OD4T (Open Data Labs Jakarta) melalui Ford Foundation, OXFAM, TAF melalui Inisiatif, EU dan BMZ melalui Handicap International, EU melalui SFCG (Search for Common Ground).

2.13. Organisasi

Anggota:

Agam fatchurrochman, Agus Eko Purwanto, Achmad An'am Thamrin, Akhmad Nasir, Deddy Heriyanto, Deni Purwo Sambodo, Farida Mahri, Johanes da Massenus Arus, Lukman Hakim, M.B. Damairia Pakpahan, Muhammad, Muchtar Abbas, M. Sulistyobroto, Ridaya Laodengkowe, Rinto Andriono, Sumarti Sukaningsih, Sri Hidayati, Sunarja, Tenti Novari Kurniawati, Tiem Farikhah Usman, Valentina Sri Wijiyati, Wahyu Widiarto Basjir, Wasingatu Zakiyah, Sumarti Sukaningsih, Lukman Hakim.

Badan Pengurus : Deni Purwo Sambodo, Deddy Heriyanto, Farida Mahri.

Badan Pengawas : Wahyu W. Basjir, Tiem Farikhah Usman.

Badan Pengurus :

Direktur : Sunarja

Deputi Pengembangan Program : Tenti Novari Kurniawati

Deputi Pengelolaan Pengetahuan : Triwahyuni Suci Wulandari

Deputi Pengelolaan Lembaga : -

- Staff Program : Wasingatu Zakiyah, Isnawati, Bambang Hery Purwanto, Eko Budi Marwanto, Ignatius Kleruk Mau, Galih Pramilu Bakti, Yoga Putra Prameswari.
- Manajer Keuangan : Susi Listiana
- Akuntan : Ria Rahmawati, Sumarti Sukaningsih
- Kasir : Desi Retno Palupi
- Staff Pusat Data dan Informasi : Muhammad Khoirul Atqiya"
- Staff Administrasi : Meigita Dyah Utami
- Staff Kerumahtanggaan : Ida Wahyu Rusdiyanto, Andi Apriyanto
- Tim Ahli : Hernindya Wisnuadji, Rinto Andriono, Damairia Pakpahan, Didik S. Mulyana, Djoni Ferdiwijaya, Lukman Hakim, Petrasa Wacana, Valentina Sri Wijiyati, Wasingatu Zakiyah
- Volunteer : Ferina Anistya Fabriningrum, Lintang Wisnu Hadibawono

BAB III

PELAKSANAAN *INTERNSHIP*

3.1. Deskripsi Tugas dan Pelaksanaan *Internship*

Pekerjaan yang menjadi tanggungjawab mahasiswi selama 40 hari *internship* adalah membantu mengerjakan program-program kerja yang dilakukan oleh Perkumpulan Idea. Pada proses *internship* mahasiswi terlibat dalam proses kerja data dan kerja jejaring. Kerja data yang bersifat pokok, yaitu: input data Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Gunungkidul 2015-2016, program Sistem Informasi Desa (SID) melakukan *scraping cleaning* data, mencari data sekunder kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Gunungkidul. Kerja data yang bersifat kondisional adalah kerja notulen dan transkrip. Kerja jejaring Perkumpulan Idea, yaitu mahasiswi terlibat dalam program. Mengikuti kegiatan atau menghadiri undangan yang diselenggarakan oleh mitra Perkumpulan Idea.

Pelaksanaan tugas tersebut berada di bawah koordinasi Mba Triwahyuni Suci Wulandari, sebagai Deputy Pengelola Program Perkumpulan Idea. Semua tugas dilakukan bersama-sama dengan staff terkait dengan program kerja yang dilakukan.

3.2. Deskripsi Proses Kerja Data

Kerja data merupakan kerja pokok dan kondisional yang dilakukan oleh mahasiswi *internship*. Kerja pokok yang dilakukan adalah berkaitan dengan pencarian dan pengolahan data. Kerja data yang bersifat kondisional yaitu berkaitan dengan proses rekam kegiatan.

A. Deskripsi Proses Kerja Input Data SKPD Gunungkidul

SKPD adalah perangkat daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pada proses input data, mahasiswi diberikan penjelasan mengenai SKPD oleh Deputy Pengembangan Program, yaitu Ibu Tenti Novari Kurniawati. Mahasiswi diberi tugas untuk input data SKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2015 – 2016 yang

memiliki program peduli terhadap penyandang disabilitas. Sebelum melakukan input data, mahasiswi diberikan materi terkait dengan:

- a. Kebijakan terkait dengan penyandang disabilitas
 - *Convention on the Right of Person with Disability (CRPD)*
 - PERDASOS DIY
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- b. Konteks Masalah
 - Masalah penyandang disabilitas, mengenai: akuntabilitas, anggaran, partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan.
- c. Kebijakan tentang perencanaan penganggaran
 - UU No. 25 Tahun 2004
 - UU Desa
 - UU No. 6 Tahun 2014

Dokumen SKPD Kabupaten Gunungkidul 2015 - 2016 yang diinput, yaitu:

- a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB),
- e. Dinas Pekerja Umum
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahap-tahap input data SKPD Kabupaten Gunungkidul:

- a. Membuka dokumen terkait,
- b. Memidahkan data dari dokumen SKPD terkait (buku atau pdf) ke Microsoft Excel,
- c. Data dipilah berdasarkan program dan kegiatan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tujuan melakukan proses input data SKPD Kabupaten Gunungkidul, yaitu:

- a. Untuk mengetahui program dan anggaran pemerintah yang memiliki keberpihakan pada penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul,

- b. Untuk mengetahui jumlah peningkatan dan penurunan anggaran yang disediakan untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul.

Hasil akhir dari proses input data SKPD adalah koran anggaran. Koran anggaran adalah bentuk visualisasi transparansi anggaran APBD dari SKPD yang dilakukan analisis program dan anggarannya. Koran anggaran memuat pendapatan dan pembiayaan dari setiap program SKPD. Tujuan dari cetak koran anggaran adalah agar masyarakat dapat mengawasi program-program pemerintah.

B. Deskripsi Proses Kerja *Scraping* dan *Cleaning* Data Pada Program Sistem Informasi Desa (SID)

Perkumpulan Idea dan Ford Foundation bekerjasama dalam program penanggulangan kemiskinan Provinsi D.I. Yogyakarta. Pada program tersebut akan menghasilkan *output* Open Data. Menurut *Open Data Handbook Documentation* dari *Open Knowledge Foundation/School of Data*, open data merupakan bentuk keterbukaan data, terhadap publik yang dapat digunakan, didistribusikan, dan diolah kembali untuk kepentingan publik.

Data yang disajikan harus tersedia secara keseluruhan, serta tersedia dalam bentuk format data terbuka dan dapat dimodifikasi, serta dapat digabung dengan data lainnya. Pada konsep “open data”, format open data terbuka merupakan keharusan, dan tidak lagi menggunakan format data tertutup (pdf). Format data terbuka adalah format data yang dapat dibaca oleh sistem informasi (*readable system*), misalnya: csv dan excel. Open data perlu dibentuk untuk mengawasi dan mengatasi program penanggulangan kemiskinan yang dianggarkan oleh pemerintah, yaitu:

- a. Mencari akar permasalahan kemiskinan,
- b. Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia belum transparan dan akuntabel,
- c. Akses publik untuk menjangkau data program penanggulangan kemiskinan masih terbatas.

Peran mahasiswi pada program ini adalah terlibat dalam tim *scraping* dan *cleaning* open data. Tugas dan fungsi tim *scraping* dan *cleaning* open data, yaitu:

- Mengubah format data tertutup menjadi data terbuka, atau format pdf/hardfile menjadi format CSV/Excel.
- Menghapus dan merapikan data dari format data terbuka yang telah diubah, sehingga dapat dibaca sistem informasi atau aplikasi.
- Memilah data program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota, dan Provinsi.
- Menginput data yang telah dirapikan ke dalam sistem informasi atau aplikasi.

Bentuk format data terbuka, yaitu:

- Tersedia dalam situs
- Tersedia dalam bentuk yang terstruktur
- Menggunakan URI untuk penyajian data
- Data sudah bertautan antara satu dengan yang lainnya

Pembagian dokumen untuk tugas melakukan proses *Scraping* dan *cleaning* data

| Nama Anggota | Dokumen I | Dokumen II | Dokumen III |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Atqiya | APBD-Penj Sleman 2014 | APBD-Penj Sleman 2015 | APBD-Penj Sleman 2016 |
| Ferina | APBD-Penj Provinsi 2014 | APBD-Penj Provinsi 2015 | APBD-Penj Provinsi 2016 |
| Edy | APBD-Penj Bantul 2014 | APBD-Penj Bantul 2015 | APBD-Penj Bantul 2016 |
| Ferry | APBD-Penj Kulon Progo 2014 | APBD-Penj Kulon Progo 2015 | APBD-Penj Kulon Progo 2016 |
| Anjar | APBD-Penj Gunungkidul 2014 | APBD-Penj Gunungkidul 2015 | APBD-Penj Gunungkidul 2016 |
| Yoga | APBD-Penj Kota Jogja 2014 | APBD-Penj Kota Jogja 2015 | APBD-Penj Kota Jogja 2016 |
| Ignas | Realisasi Sleman 2014 | Realisasi Kota | Realisasi Bantul |
| Wisnu | Realisasi Gunungkidul 2014 | Realisasi Kulonprogo 2014 | Realisasi Provinsi |
| Bubu | APBDes Girisuko 2015-2016 | APBDes Dlingo 2015-2016 | APBDes Ngelegi 2015-2016 |

Hasil dari *scraping cleaning* data akan digunakan oleh tim analisis untuk melakukan analisis program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota dan Provinsi Yogyakarta. Tim analisis akan membuat tren analisis program penanggulangan kemiskinan, analisis dilakukan pada dokumen perencanaan anggaran dan penganggaran (LP2KD, RKPD, dan RPJMD). Hasil kerja tersebut akan *diupload* dalam web: arcapada.apdb.info

Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong transparansi APBD melalui media *online system*. Publikasi APBD pada *online system* dalam format CSV dan visual data APBD. Program ini untuk melihat respon publik pada data APBD yang ditampilkan. Respon yang diharapkan, yaitu masyarakat mengetahui informasi data APBD dan dapat memberikan tanggapan terhadap data APBD. Masyarakat diharapkan melakukan kontrol dan monitoring atas APBD dan terlibat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD.

Aplikasi open data, yaitu arcapada.apdb.info memiliki beberapa manfaat. *Pertama*, berkaitan dengan transparansi program dan anggaran dari pemerintah. Melalui data yang disajikan, masyarakat dapat melihat capaian kerja dari pemerintah. *Kedua*, masyarakat dapat membandingkan kinerja pemerintah daerah-nya dengan kinerja pemerintah daerah lain. Pada proses tersebut masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah. Langkah selanjutnya pemerintah dapat melakukan evaluasi kerja, sehingga akan tercipta pemerintah yang baik.

C. Transkrip dan Notulensi Rapat

Notulen memiliki tugas dan peran yang penting dalam sebuah rapat atau diskusi. Mahasiswa memiliki tugas tambahan membantu staff administrasi Perkumpulan Idea untuk melakukan transkrip dan menjadi notulen. Mahasiswa diberi pengarahan mengenai hal-hal yang harus ditulis di dalam diskusi atau rapat, yaitu:

- a. Mencatat topik permasalahan,
- b. Mencatat waktu dan tempat pelaksanaan,
- c. Mencatat jumlah peserta,
- d. Menyimak dan mencatat segala hal atau proses yang berlangsung dalam diskusi,
- e. Menulis kesimpulan atau hasil diskusi,

- f. Mendokumentasikan catatan tentang diskusi yang telah dilakukan.

Tujuan dari notulen rapat adalah untuk mengetahui hasil suatu rapat. Notulen rapat merupakan catatan ringkasan dari suatu kegiatan. Fungsi notulen sangat penting, karena di dalam notulensi semua kegiatan rapat akan dibuktikan secara tertulis. Fungsi notulen, yaitu:

- a. Berfungsi sebagai bukti tertulis, telah diadakan rapat,
- b. Sebagai pengukur sukses atau tidaknya rapat yang diadakan,
- c. Berfungsi sebagai pelaksana kegiatan yang dihasilkan dari keputusan rapat.

Tujuan mahasiswi dijadikan sebagai notulensi, yaitu agar mahasiswi mengetahui program yang sedang dikerjakan oleh Perkumpulan Idea. Mahasiswi terlibat dalam proses dan memiliki materi hasil rapat, diharapkan akan mengetahui secara detail program yang sedang dan akan dikerjakan.

Hambatan yang dialami mahasiswi pada proses kerja transkrip data adalah rekaman suara yang kurang jelas. Hambatan tersebut membuat rekam proses data kurang lengkap. Hambatan pada saat menjadi notulen, jika dalam kegiatan tidak ada alat bantu *voice recorder*. *Voice recorder* menjadi alat pendukung bagi notulen, alat tersebut bisa membantu notulen untuk melengkapi proses rekam data.

D. Mencari Data Sekunder Kekerasan Perempuan di Kabupaten Gunungkidul

Data kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Gunungkidul akan digunakan untuk mempertingati IWD (*International Women Day*) di Alun-alun Gunungkidul. Data yang diperlukan untuk memperingati aksi IWD, yaitu:

a. Data KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)

Jumlah KDRT tahun 2013 sampai bulan September mencapai 22 kasus (didominasi oleh anak-anak, perempuan korban perkosaan, dan kekerasan psikis). Korban terdiri dari 13 orang anak-anak, 9 orang perkosaan (8 orang perempuan dan 1 orang laki-laki). Data BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana) Kabupaten Gunungkidul di Kecamatan Playen, pelajar melakukan kekerasan seksual pada 3 perempuan.

Menurut *women crisis center* divisi pengorganisasian masyarakat dan advokasi LSM Rifka Annisa, tahun 2015 di Kabupaten Gunungkidul telah terjadi 313 kasus kekerasan terhadap perempuan.

b. Data Dispensasi Nikah Kabupaten Gunungkidul

Menurut sumber berita Kedaulat Rakyat, dipos pada tanggal 11 Agustus 2015. Pernikahan usia dini di Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan sampai tanggal 11 Agustus 2015. Pada tahun 2013 terjadi 163 kasus, tahun 2014 ada 150 kasus, dan tahun 2015 (sampai bulan Juni) terjadi 42 kasus. Contoh lokasi di Kecamatan Gendangsari, tahun 2012 terjadi 13 kasus, tahun 2013 ada 9 kasus, tahun 2014 ada 6 kasus, 2015 (sampai awal Agustus) ada 2 kasus pernikahan dini.

BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana) Kabupaten Gunungkidul, tahun 2013 – Juni 2015 Pengadilan Agama Wonosari melakukan permohonan dispensasi kawin sebanyak 366 permohonan. 355 permohonan dikabulkan, ditolak dan gugur ada 4 permohonan, dan dicabut ada 7 permohonan.

Ruang lingkup Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak, meliputi:

- Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak
- Penguatan kelembagaan
- Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, bagi orang tua, keluarga, dan masyarakat.
- Pengaduan
- Kebijakan, strategi, dan program
- Monitoring dan evaluasi
- Pembiayaan

c. Data KDP (Kekerasan Dalam Pacaran)

Menurut *women crisis center* divisi pengorganisasian masyarakat dan advokasi LSM Rifka Annisa, tahun 2015 terjadi 34 kasus kekerasan dalam pacaran.

d. Pelecehan Seksual

Menurut *women crisis center* divisi pengorganisasian masyarakat dan advokasi LSM Rifka Annisa, tahun 2015 terjadi 15 kasus pelecehan seksual dan 36 kasus perkosaan.

Isu gender menjadi salah satu fokus kajian di Perkumpulan Idea. Tujuan mahasiswi diberikan tugas tersebut, agar mahasiswi mempelajari isu gender yang

terjadi di wilayah Yogyakarta. Ketika mahasiswi terlibat dalam kegiatan tersebut, mahasiswi sudah memiliki data yang berkaitan dengan isu gender.

3.3 Deskripsi Proses Kerja Jejaring

Kerja jejaring adalah kerja yang dilakukan mahasiswi untuk memenuhi undangan dari mitra Perkumpulan Idea. Melalui kegiatan tersebut mahasiswi diberi kesempatan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan jaringan. Mahasiswi terlibat dalam kegiatan sebagai bagian dari tim program Perkumpulan Idea dan partisipan dari kegiatan Mitra Idea.

A. Program AFC (Advocation for Changes)

Deskripsi Program

Pada tahun 2013-2014, dengan dukungan GIZ melalui program Advokasi untuk Perubahan (AfC), HI menekankan fokusnya pada partisipasi penyandang disabilitas dalam mekanisme pemerintahan daerah. HI akan melanjutkan proses ini selama 3 tahun ke depan (2016-2018) melalui pilar AfC lainnya yaitu sebuah program: "Membangun kapasitas pemerintah dan masyarakat setempat serta jejaringnya untuk proses pengelolaan anggaran publik yang lebih partisipatif, inklusif dan terbuka". Program ini didukung oleh Uni Eropa (EU).

Peran mahasiswi dalam proses kerja ini adalah melakukan pendampingan dalam proses pelatihan kepada subyek program. Pelatihan tersebut dilakukan di dua wilayah Kota Yogya (Kelurahan Baciro, Kelurahan Kadipaten, dan Kelurahan Kraton) dan wilayah Gunungkidul (Desa Beji, Desa Nglipar, dan Desa Plembutan).

Melalui project AfC ini diharapkan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dapat meningkat kapasitasnya tentang manajemen keuangan publik, proses pemerintahan daerah yang inklusif, dari perencanaan sampai dengan implementasi anggarannya. Untuk itu, project ini akan mengimplementasikan kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Organisasi. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh alumni ToT atau Master Trainer tingkat Kabupaten, Kota, Desa, dan Kelurahan kepada anggota organisasi serta kelompok rentan di wilayah masing-masing. Peserta yang terlibat di tiap wilayah yaitu 17 peserta yang terdiri 50% perempuan, 15% disabilitas, dan 35% kelompok rentan lainnya. Khusus tingkat jaringan, peserta yang terlibat adalah mereka yang mewakili organisasi/kelompok/komunitas kelompok rentan termasuk disabilitas.

Total wilayah asal partisipan replikasi adalah 4 lokasi/komunitas, yakni Kel. Baciro, Kel. Kadipaten, Kel. Cokrodingratan, dan Jaringan CSO/CBO Kota

Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya, kegiatan replikasi dilakukan di 3 lokasi dengan menggabungkan dua wilayah/komunitas menjadi satu dan 2 wilayah lainnya di lokasinya masing-masing. Perincian penggabungan wilayah adalah sebagai berikut : 1) Kel. Baciro dan Jaringan CSO/CBO Kota Yogyakarta, 2) Kel. Kadipaten, dan 3) Kel. Cokrodiningratan.

Tujuan Program

Tujuan dari kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat ini adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas anggota organisasi tentang organisasi dan pengorganisasian.
- b. Meningkatkan pemahaman diri masyarakat kelompok rentan sebagai bagian dari proses pembangunan.
- c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya membangun organisasi berbasis kelompok rentan, mengenal aturan organisasi yang komprehensif, dan mampu menjadi agen perubahan dalam komunitasnya.

Outcome yang diharapkan dari Kegiatan

Outcome dari kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat adalah:

- a. Adanya proses pembelajaran bersama yang berkelanjutan antara Master Trainer bersama warga kelompok rentan tentang kelompok rentan dan posisinya dalam pembangunan, organisasi dan pengorganisasian, syarat dan kelengkapan organisasi yang komprehensif, dan mampu menjadi agen perubahan dalam komunitasnya
- b. Munculnya warga masyarakat kelompok rentan yang memahami dan menyadari dirinya sebagai kelompok rentan dan posisinya dalam konteks dalam pembangunan, organisasi dan pengorganisasian, syarat dan kelengkapan organisasi yang komprehensif, dan mampu menjadi agen perubahan dalam komunitasnya
- c. Munculnya komitmen bersama antara master trainer dan warga kelompok rentan untuk mendorong pembentukan dan/atau menguatkan organisasi/kelompok/jejaring warga masyarakat kelompok rentan di setiap wilayah (desa/kelurahan/jaringan).

B. Forum Diskusi Tribun – Satunama VI

Mahasiswi menghadiri kegiatan diskusi sebagai perwakilan dari IDEA. Diskusi diadakan pada hari Rabu, 2 Maret 2016, di ruang rapat redaksi kantor Tribun Jogja. Tema diskusi adalah “Masa Depan Inklusi di DIY: Pengalaman Praktik Kebijakan di Kabupaten Kulon Progo.

Partisipan dalam diskusi ini terdiri dari jejaring organisasi masyarakat sipil (OMS) terutama yang bergerak dalam isu demokrasi, toleransi, keadilan sosial, HAM, akademisi, dan masyarakat. Narasumber dalam diskusi ini adalah:

- a. Pembicara 1 : Khairul Salim – Perwakilan LKIS
Materi: Potret Inklusi di DIY dari pengalaman lapangan.
- b. Pembicara 2 : Triwardoyo – Diskampol Kulon Progo
Materi: Pengalaman Praktik Kebijakan Inklusi di Kab Kulon Progo
- c. Pembicara 3 : Muskin – MUI DIY
Materi: Tantangan dan Hambatan Inklusi di DIY

Diskusi tersebut memiliki tujuan untuk:

- a. Melihat potret inklusi di DIY dari pengalaman lapangan.
- b. Mendiskusikan praktik baik kebijakan inklusi di Kabupaten Kulon Progo.
- c. Mengetahui tantangan dan hambatan praktik inklusi di DIY.
- d. Merumuskan bersama masa depan inklusi di DIY.

Isi Diskusi:

Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 E Ayat 1 (satu) dan 29 Ayat 2 (dua). Pada praktiknya belum semua warga Negara memiliki kemerdekaan dalam memeluk agama dan kepercayaan. Terutama yang dialami oleh komunitas penghayat, kepercayaan lokal. Beberapa bulan lalu, salah satu sanggar tempat ibadah penghayat Sapto Darmo dibakar oleh massa intoleran di Rembang. Ada juga kasus jenazah penghayat yang ditolak dimakamkan di pemakaman umum warga. Tidak hanya dialami oleh Sapto Darmo, namun komunitas penghayat lain di 7 wilayah yang didampingi oleh Yayasan Satunama memiliki nasib yang sama.

Beberapa permasalahan yang dialami komunitas penghayat, antara lain: Pertama, tidak adanya pengakuan dari pemerintah. Tidak adanya pengakuan membuat komunitas penghayat harus memilih salah satu agama yang diakui, jika ingin mendapat akses terhadap pelayanan Negara. Seperti layanan pembuatan Kartu

Keluarga (KK), akte kelahiran, maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kedua, komunitas penghayat sering mendapat kekerasan dari pata intoleran. Kekerasan dalam bentuk intimidasi, pembakaran tempat ibadah. Ketiga, komunitas penghayat sangat dekat dengan kemiskinan, karena kurang adanya akses terhadap layanan Negara. Layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Inklusi sosial menjadi sebuah tawaran yang sangat relevan untuk menjawab problem diatas. Inklusi sosial mengingatkan bahwa sejak jaman dulu, kita mempunyai akar ke-Bhinekaan. Beragam dan multikultur. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah wilayah otonom yang memiliki hak untuk mengatur sendiri turunan kebijakan dari pusat untuk diimplemetasikan sesuai dengan potensi yang ada. Seperti diketahui juga bahwa komponen dan elemen masyarakat yang ada di DIY ini berbasis multikultur dan multi dimensi yang meskipun bisa dikatakan beberapa bagian dari masyarakatnya merupakan pendatang dari wilayah lain, hal itu tidak bisa dipungkiri mulai dari level pelajar, mahasiswa, pegawai bahkan pedagang.

Daftar Anggota Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dacrah Kulon Progo

- a. Anggayuh Panglereming Napsu (APN), alamat: Rt 52/24 Wates Kulon Progo.
- b. Anuraga Sri Sadono, alamat: Depok III Rt 11/06 Panjatan.
- c. Hak Sejati, alamat: Salam I Plumbon Sentolo.
- d. Hidup Betul, alamat: Dusun II Ngestiharjo Wates.
- e. Imbal Wacono, alamat: Dusun II Ngestiharjo Wates.
- f. Jati Luhur, alamat: Gunung Gempal Giripeni Wates.
- g. Kasampurnan Jati, alamat: Hargorejo Kokap.
- h. Ngesti Roso, alamat: Banjararum Kalibawang.
- i. Persatuan Eklasing Budi Murka (PEBM), alamat: Gunung Gempal Giripeni Wates.
- j. Ngudi Utomo, alamat: Purwoharjo, Samigaluh.
- k. Sumarah, alamat: Pagerharjo, Samigaluh.
- l. Sapta Darma, alamat: Kedodong II Banjararum Kalibawang.
- m. Setia Budi Perjanjian 45. (SBP 45), alamat: Dukuh III Gotakan Panjatan.
- n. Traju Mas, alamat: Jeringan Kebonharjo, Samigaluh.
- o. Tulis Tanpo Papan Kasunyatan Jati, alamat: Seling 17/05 Temon KuloN Temon.
- p. Komunitas Indra Prasta, alamat: Kadipaten Triharjo Wates.

Sumber: Romo Tsino Raharjo, 2015

Berbagai riset menunjukkan, Yogyakarta sebagai kota City of Tolerance beberapa tahun terakhir sering tersandung kasus-kasus intoleran yang cukup serius, bahkan penelitian Wahid Institue menempatkan DIY sebagai daerah yang intoleran kedua di Indonesia. Tentu tak dapat digeneralisir, karena di tengah intoleransi yang menguat, justru ada secercah harapan dari Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2012, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 475/2744/x/2012 tentang Layanan Administrasi Kependudukan bagi Penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa. Surat Edaran yang ditujukan bagi seluruh Camat dan Kepala Desa di Kulon Progo secara tegas menyatakan antara lain; Pertama, pembuatan KTP bagi penganut penghayat kepercayaan tetap akan dilayani walau tidak ingin mencantumkan agama; Kedua, penganut penghayat juga tetap dapat mengisi data lengkap aliran kepercayaannya; Ketiga, dalam hal perkawinan, Pemerintah Desa tetap berkewajiban untuk memberikan surat keterangan perkawinan; Keempat, dalam hal pengakuan dan pengesahan anak, diberlakukan seperti halnya perkawinan pengakuan dan pengesahan anak bagi agama non Muslim.

Kebijakan Kabupaten Kulon Progo diatas, adalah contoh yang sangat baik bagaimana negara membuka pintu bagi penghayat kepercayaan untuk mendapatkan akses layanan sosial yang selama ini belum mereka dapatkan. Kulon Progo juga sudah memulai dengan upaya pendidikan inklusif bagi difabel, jauh sebelum Pemerintah Provinsi DIY mengeluarkan kebijakan yang sama tersebut. Penghayat kepercayaan dan diffable hanyalah contoh entitas yang perlu untuk digawangi. Jauh diluar hal tersebut masih banyak beberapa kelompok elemen masyarakat untuk selalu diperhatikan, yang belum mendapatkan hak melalui kebijakan undang-undang hingga tersendatnya akses layanan sosial yang pada aspek paling dasar adalah belum adanya penerimaan sosial di level antar masyarakat. Bahwa inklusi sosial itu tidak hanya milik entitas dan satu golongan saja, melainkan segala elemen masyarakat bisa mendapatkan hak yang selayaknya, mendapatkan identitas yang jelas sebagai warga negara serta dapat mengakses untuk kesejahteraan tanpa dihindangi rasa takut atas identitasnya sendiri.

C. Diskusi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)

Mahasiswi mengikuti kegiatan diskusi sebagai perwakilan dari IDEA. Diskusi diadakan pada Kamis, 17 Maret 2016, di Hotel The 101 Yogyakarta Tugu Hotel. Diskusi mengenai rapat kerja dan penguatan tim Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM). Tema diskusi adalah “Bersama Mengauatkan Pemilu yang Demokratis”.

D. Diskusi Pengawasan Pemilu

Mahasiswi mengikuti kegiatan diskusi sebagai perwakilan dari IDEA. Diskusi diadakan pada Sabtu, 19 Maret 2016 di Kantor Bawaslu DIY. Tema diskusi adalah “Awasi Pemilu: Upaya Mencari Pemimpin Daerah yang Anti Korupsi dan Mensejahterakan Rakyat”. Pembicara dalam diskusi adalah:

- a. Pembicara 1 : Bapak Wawan Budianto (KPU Kota Jogja)
- b. Pembicara 2 : M. Najib (Bawaslu DIY)
- c. Pembicara 3 : Titi Angraini (Perludem Jakarta)

E. Diskusi Kultural

Diskusi ini diselenggarakan oleh SAPDA – KPKM UGM dengan tema diskusi “Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Penyandang Disabilitas”. Diskusi diadakan pada Rabu, 31 Maret 2016 di RM. Mataram Indah Jl. Wonosari km7, Baturetno, Banguntapan Bantul. Pembicara dalam diskusi ini adalah:

- a. Pembicara 1 : Ibu Yuli – Orang tua dari anak penyandang disabilitas (tuna grahita).

Berdiskusi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi bagi anaknya yang menyandang disabilitas tuna grahita.

- b. Pembicara 2 : Mbak Ria – Rungu wicara

Berdiskusi mengenai kesehatan reproduksi pada remaja tuli, hak-hak pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja tuli, pencegahan terjadinya pelecehan seksual pada remaja tuli/

- c. Pembicara 3 : Bapak Prawoto – Orang tua dengan anak penyandang disabilitas (Tuna rungu).

Berdiskusi mengenai perlakuan diskriminasi terhadap anaknya di lingkungan rumah. Fasilitas dan pelayanan dari pemerintah dan pihak Sekolah Luar Biasa (SLB) belum berpihak pada anak disabilitas,

d. Pembicara 4 : Mbak Rini – SAPDA

Memberikan materi mengenai hal yang sudah dilakukan SAPDA terkait dengan pelecehan seksual bagi anak penyandang disabilitas.

F. Diskusi Upaya Penyusunan Modul Pelatihan Pengarusutamaan Gender ditingkat Dasar.

Mahasiswa menghadiri diskusi ini sebagai perwakilan dari IDEA. Diskusi ini diadakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM). Diskusi diadakan pada Selasa, 19 April 2016 di Ruang Audit A BPPM Yogyakarta.

Kegiatan ini merupakan upaya penyusunan modul pengarusutamaan gender ditingkat dasar. Selama proses penyusunan modul, sudah melakukan penjaringan masukan untuk modul dengan mengadakan dua kali FGD. FGD pertama dilakukan pada 17 Maret 2016 dan FGD kedua pada 31 Maret 2016. Tujuan dari penyusunan modul ini untuk memberikan pemahaman kepada peserta dari instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masyarakat umum. Muncul modul pengarusutamaan gender ditingkat dasar, karena di beberapa kegiatan masih banyak pemahaman gender yang belum sama. Pada modul ini yang akan dijadikan pokok bahasan adalah:

- a. Terkait dengan sejarah perjuangan kesetaraan gender.
- b. Kebijakan pengarusutamaan gender.
- c. Konsep tentang gender.
- d. Pemahaman pengarusutamaan gender.
- e. Mengidentifikasi permasalahan gender atau analisis gender.
- f. Gender dan permasalahan sector.
- g. Data pilah gender.
- h. Perencanaan anggaran responsive gender.

G. Seminar Mendorong Peraturan Daerah dalam Pemenuhan Hak Disabilitas

Mahasiswa menghadiri seminar ini sebagai perwakilan dari IDEA. Seminar diadakan oleh Ciqal dan forum penguatan hak-hak penyandang disabilitas. Seminar diadakan pada Rabu, 20 April 2016 di Aula BAPPEDA Kabupaten Sleman. Tema seminar adalah “ Seminar Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman”. Pembicara pada seminar tersebut adalah:

- a. Pembicara 1 : Drs. Untoro Budiharjo, MM (Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
- b. Pembicara 2 : Dr. M. Nurul Yamin, M.Si

- c. Pembicara 3 : Nuning S, SH (FPHPD)
- d. Pembicara 4 : dr. Sunartono, M.Kes (Sekda Kabupaten Sleman)

Seminar ini memiliki tujuan, yaitu:

- a. Masukan substansi Raperda perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Kab. Sleman (draft).
- b. Kebutuhan-kebutuhan terkait pelaksanaan Raperda.
- c. Merumuskan strategi masyarakat Raperda.

Isi seminar:

Dasar hukum pada Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 berbunyi: *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, Pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 berbunyi : "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

Hak asasi manusia (Pasal 1 UU No. 39/1999) Seperangkat hak melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah-Nya, Wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Konvensi Hak-hak penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention of the Rights of Persons with Disabilities). Perjanjian internasional yang menetapkan apa yang harus dilakukan negara untuk memastikan bahwa semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak asasi manusia sama seperti orang lain. Amanat dari konvensi, bahwa Negara-negara pihak harus melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas, sehingga berimplikasi perlunya melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas.

Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi dengan memberikan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Menuju Sleman sebagai Kabupaten ramah penyandang disabilitas. terkait dengan pembagian urusan atau kewenangan Pemerintah Kabupaten diperlukan penyusunan regulasi yang mempunyai pertimbangan strategis dan terdapat keragaman kebutuhan serta persoalan yang dihadapi Penyandang Disabilitas maka dibutuhkan kebijakan yang lebih spesifik yaitu mewujudkan PERDA terkait penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Peraturan daerah terkait dengan penyandang disabilitas menjadi isu penting, karena penyandang disabilitas belum sepenuhnya menjadi bagian dari proses pembangunan. Peraturan daerah ini bisa menjamin perwujudan hak-hak penyandang disabilitas. Materi usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, ada beberapa prinsip-prinsip:

- a. Penghormatan pada martabat dan nilai yang melekat;
- b. Hak otonomi;
- c. Kemandirian;
- d. Keadilan;
- e. Inklusi;
- f. Nondiskriminasi;
- g. Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat;
- h. Kesetaraan hak dan kesempatan;
- i. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih;
- j. Aksesibilitas;
- k. Kesetaraan gender dan keadilan gender;
- l. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari anak dengan disabilitas dan penghormatan pada anak dengan disabilitas untuk mempertahankan identitas mereka; dan
- m. Keragaman manusia dan kemanusiaan.

Hak dan kesempatan penyandang disabilitas:

a. Pendidikan

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi. Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif. Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar. Pemerintah Daerah membentuk pusat sumber pendidikan inklusi. adalah Lembaga yang menjadi sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif guna memperlancar, memperluas, meningkatkan kualitas, dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

b. Ketenagakerjaan dan lapangan kerja;

Pengaturan mengenai Kuota dalam Hak Pekerjaan Pasal 30 dan 31 (Raperda ini); Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (duapersen) Penyandang Disabilitas. Pengaturan kuota ini diatur juga dalam Undang-undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 53; (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dan (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja

- Kesehatan;
- Sosial;
- Politik;
- Hukum;
- Aksesibilitas;
- Penanggulangan resiko bencana;
- Tempat tinggal;
- Seni, budaya, pariwisata, dan olah raga; dan
- Bebas dari kekerasan.

3.4. Deskripsi Proses Kerja Tambahan

Proses kerja yang dilakukan mahasiswi tidak hanya fokus pada kerja utama, tetapi mahasiswi juga mendapat tugas tambahan. Tugas tersebut terkait dengan keikutsertaan mahasiswi dalam kegiatan yang dilakukan IDEA. Mahasiswi dilibatkan sebagai panitia dalam proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

A. Panitia Kegiatan FGD Revitalisasi Sistem Informasi Desa (SID) untuk Optimalisasi TKPK Desa se-Gunungkidul.

Mahasiswi terlibat dalam kegiatan FGD yang diadakan oleh IDEA sebagai panitia kegiatan. Kegiatan tersebut diadakan selama 3 hari pada tanggal 28 – 30 Maret 2016, di Ruang rapat DPPKAD Gunungkidul lantai 3. Hal yang dipersiapkan sebelum kegiatan adalah uang transport untuk peserta, kesiapan ruang kegiatan, transportasi ke lokasi kegiatan, daftar presensi peserta, alat tulis dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan.

Kegiatan tersebut untuk mendorong sistem informasi kemiskinan yang partisipatif, transparan dan akuntabel untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan. Jumlah partisipan sebanyak 210 orang, dibagi dalam 3 hari kegiatan berdasarkan kecamatan dan desa.

Manfaat dari kegiatan workshop, yaitu:

- a. FGD revitalisasi SID untuk optimalisasi TKPK Desa se-Kab. Gunungkidul
- b. Gunungkidul Menakar capaian implementasi SID di 144 Desa se-Kab. Gunungkidul
- c. Merekomendasikan langkah strategis untuk penguatan SID kedepan.

B. Jaga Stand IDEA

Mahasiswi terlibat dalam kegiatan Jagongan Media Rakyat (JMR). JMR adalah suatu kegiatan yang diinisiasi oleh COMBINE. Kegiatan tersebut diadakan di Jogja Nasional Museum. Kegiatan yang berlangsung pada 21 – 24 April 2016 memiliki rangkaian acara pemutaran film, diskusi, pagelaran seni dan pameran stand yang diikuti oleh berbagai kalangan. IDEA turut berpartisipasi dalam kegiatan tersenut dengan mengisi salah satu stand yang telah disediakan. Pada acara tersebut mahasiswi memiliki kesempatan untuk menjaga stand IDEA selama 1 hari, 21 April 2016.

Stand IDEA diisi dengan berbagai modul dan buku terkait dengan program IDEA, brosur IDEA. Modul dan buku mengenai korupsi, hak-hak penyandang disabilitas, korang anggaran Gunungkidul dan Provinsi DIY, aksesoris seperti gelang, kaos, dan stiker yang bertemakan gerakan anti korupsi.

3.5. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam Proses Kerja *Internship*

- a. Mahasiswi mengalami kesulitan melakukan tugas *internship*. Hal tersebut karena pada saat interview mahasiswi tidak menanyakan secara detail mengenai tugas yang akan dikerjakan. Setelah mendapat penjelasan singkat mengenai tugas *internship*, mahasiswi tidak mencari referensi pengerjaan tugas yang diberikan. Hal tersebut berdampak pada efektivita waktu dan produktivitas yang berkurang pada masa *internship*.
- b. Mahasiswi mengalami kesulitan ketika akan melakukan proses input data SKPD. Mahasiswi dituntut untuk mengetahui program dan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Mahasiswi juga dituntut untuk dapat membaca anggaran program pemerintah. Kedua hal tersebut tidak didapatkan mahasiswi dalam proses kuliah, sehingga untuk menyelesaikan tugas tersebut membutuhkan waktu selama 1 bulan.
- c. Menurut Weber (dalam Liliweri, Alo 1997) organisasi yang baik harus mempunyai struktur dan fungsi yang mampu menjelaskan pembagian tugas dan fungsi, rentang kendali atau pengawas, pola-pola hubungan kerja anatrpribadi yang bersifat rasional dan imperasionalitas, serta mekanisme "*reward dan punishment*". Pada pembagian tugas dan fungsi, belum ada kejelasan mengenai staff Idea yang dapat memberikan masukan mengenai format input data. Hal tersebut membuat mahasiswi mengalami kebingungan, karena mahasiswi mendapatkan berbagai contoh format input data dari beberapa staff Idea.

Mahsiswi *internship* berada dibawah pengawasan Deputy Pengelola Pengetahuan Idea, tetapi pada saat input data nerada dibawah arahan Deputy Pengelola Program dan pad asaat pengerjaan mahasiswi diberi arahan oleh staff program.

3.6. Refleksi Kerja *Internship* dalam Prespektif Sosiologi

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang relasi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Ketiak melakukan *internship* di Perkumpulan Idea, ada beberapa persoalan yang

dihadapi oleh teman-teman staff Idea. Persoalan tersebut mengenai manajemen waktu dari setiap staff, penumpukan pekerjaan, pelimpahan tugas, dan SDM yang terbatas.

Perspektif sosiologi organisasi membantu mahasiswi untuk memahami perubahan dan perkembangan serta dinamika yang ada di Perkumpulan Idea. Menurut Muhammad Arni (2007) organisasi merupakan suatu sistem mengkoordinasi aktivitas dan mencapai tujuan bersama atau tujuan umum. Hal tersebut, karena organisasi terdiri dari berbagai bagian yang saling tergantung satu sama lain. Perspektif ini juga membantu mahasiswi untuk membaca aktor-aktor di Perkumpulan Idea terkait dengan peran dan fungsi.

Perspektif dalam sosiologi organisasi juga membantu mahasiswi dalam memahami struktur organisasi di Perkumpulan Idea. Menurut Liliweri Alo (1997) setiap organisasi memiliki pola kewenangan yang memperlihatkan fungsi hubungan antara “struktur atas” dengan “struktur bawah”. Pada setiap kewenangan organisasi tersebut ada seorang pemimpin dengan sejumlah orang menjadi pengikut. Sebutan struktur di Perkumpulan Idea yang menduduki struktur atas, yaitu direktur. Sebutan struktur untuk pengikut, yaitu staff. Direktur dan staff di Perkumpulan Idea diletakkan dalam sistem “ordering” atau pemeringkatan. Pemeringkatan bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan kedudukan, tugas, fungsi, peran dari setiap orang dalam organisasi.

Menurut Liliweri, Alo (1997) karakteristik pemeringkatan dalam suatu organisasi akan melahirkan ruang lingkup kewenangan, keputusan dan pengaruh yang bersumber dari atasan untuk menguasai, memutuskan sesuatu demi kepatuhan bawahan. Hubungan kewenangan ini di Perkumpulan Idea membentuk sebuah jaringan komando dimulai dari atas ke bawah dan sebaliknya membentuk garis tanggungjawab dari bawah ke atas.

Perspektif sosiologi organisasi membantu mahasiswi untuk melihat komunikasi organisasi di Perkumpulan Idea. Menurut Redding dan Sanbon (dalam Muhammad, Arni 20017) bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Komunikasi tersebut mengenai komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi *downward* atau komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi *upward* atau komunikasi dari orang-orang yang sama level atau tingkatnya dalam

organisasi, keterampilan dalam berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan, menulis, dan komunikasi evaluasi program.

Bentuk komunikasi di Perkumpulan Idea, staff idea dapat melakukan komunikasi *upward* dan komunikasi horizontal secara langsung. Direktur dapat melakukan komunikasi secara *downward* pada staff. Struktur atas dan struktur bawah Perkumpulan Idea mempunyai keterampilan berkomunikasi dengan baik. Hal tersebut, karena setaip individu diberi kesempatan untuk berbicara, seperti memimpin rapat dan diskusi, menyampaikan gagasan, dan komunikasi evaluasi program kegiatan. Komunikasi program membahas mengenai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Matakuliah yang memiliki cara pandang teori-teori kritis, membantu mahasiswi untuk dapat memahami isu-isu kesetaraan gender dan kelompok marginal. Matakuliah ii membantu mahasiswi untuk dapat berperan aktif ketika mengikuti kegiatan diskusi dengan mitra Idea.

Matakuliah sosiologi media membantu mahasiswi melihat media *online* dan cetak memiliki peran sebagai bentuk transparansi anggaran pada program penanggulangan kemiskinan. Minimnya akses masyarakat untuk dapat menjangkau data program penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu penyebab program tersebut kurang berjalan optimal. Oleh sebab itu masyarakat perlu diberi akses terkait dengan program penanggulangan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah.

Memberikan aksesibilitas informasi kepada masyarakat dapat menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan. Bentuk informasi yang diberikan adalah anggaran dan program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Upaya memberi akses ke masyarakat adalah untuk mengupayakan keterbukaan data publik atau disebut dengan open data.

Menurut *open data Handbook Document* dari *open knowledge foundation/school of data*, open data merupakan bentuk keterbukaan data, khususnya data milik pemerintah terhadap publik yang dapat digunakan, didistribusikan, dan diolah kembali untuk kepentingan publik. Pada konsep open data, format data terbuka merupakan keharusan dan tidak lagi menggunakan dan tertutup. Format data terbuka adalah format data yang dapat dibaca oleh sistem informasi (*readable system*),

misalnya: CSV dan *Microsoft excel*. Keterbukaan data harus mengandung manfaat keterbukaan pada masyarakat, mudah diakses dengan regulasi yang jelas, dan kebebasan menggunakan data tersebut dengan tujuan baik.

Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan Provinsi merupakan contoh dari dokumen publik. Dokumen publik adalah dokumen yang boleh diakses oleh masyarakat, keberadaanya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Perkumpulan Idea bekerjasama dengan Ford Foundation melakukan inisiatif “open data” program penanggulangan kemiskinan. Perkumpulan Idea menginisiasi uapay “open data” dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas penanggulangan kemiskinan. Tujuan ini agar program penanggulangan kemiskinan menjadi transparan dan akuntabel, sehingga dapat optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada proses membentuk sistem aplikasi open data, data yang digunakan adalah data dengan format terbuka (CSV dan Excel). Data dengan format terbuka akan lebih mudah dibaca oleh sistem. Beberapa hambatan dalam mengakses data dengan format terbuka, yaitu:

- a. Pada program penanggulangan kemiskinan, data program bersifat tertutup (pdf).
- b. Beberapa pemerintah daerah hanya bersedia memberikan dalam bentuk *hardfile* (dokumen APBD).
- c. Belum ada aplikasi yang mengelola keterbukaan data program penanggulangan kemiskinan, khususnya aplikasi dengan tampilan *smartphone*.
- d. Akses dokumen melalui sistem *online* rumit. Pengunjung situs harus melakukan registrasi, dan dokumen yang tersedia tidak lengkap.
- e. *Trust*, kurang ada sikap percaya pegawai pemerintah kepada publik, ketika masyarakat akan mengakses data APBD dengan format terbuka.

Hambatan tidak hanya terjadi pada proses akses dokumen. Hambatan kerja juga terjadi pada sistem aplikasi yang belum optimal. Situs www.apbd.arcapada.info memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Sistem belum optimal melakukan *tracking* secara detail.

- b. Beberapa dokumen APBD ada konten yang tidak sesuai dengan judul, sehingga tidak dapat diunggah ke aplikasi open data. Misalnya: Dinas Perindag ESDM, tetapi kontennya Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (KP/2015), Dinas Pendidikan (KP/2014) tetapi kontennya Sekertariat Daerah (KP/2014), sehingga admin tidak mempunyai data terkait dinas tersebut.
- c. Aplikasi belum optimal dalam membaca data nomor rekening program.
- d. Pemberian no Kode Rekening yang berubah menjadi kendala pada aplikasi ini. Sebagai contoh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada tahun 2016 mempunyai kode rekening 1.06.18.00; sedangkan tahun 2014 dan 2015 kode rekening institusi ini adalah 1.06.01.00. Perubahan kode rekening ini mempersulit sistem aplikasi Arcapada Open Data untuk mengidentifikasi, sehingga tran perencanaan dan penganggaran tidak dapat dilakukan secara sistem.
- e. Membaca kode rekening, sebagai contoh: 1.06.1.06.01.001.001.5.2.2 ; dapat dibaca dan dijabarkan sebagai berikut:
- 1 → urusan wajib seperti: Pendidikan, Kesehatan, dsb. Kalau 2 → Urusan pilihan, seperti → Pertanian, Kehutanan, dsb.
 - 06 → Kode urusan seperti ini 01 untuk menunjukkan Kode Urusan Pendidikan.
 - 1.06.01 → Kode Instansi/OPD, seperti 1.06.01 menunjukkan Kode Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 001. → Kode Kegiatan, seperti 001. Menunjukkan Kodea Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 001. → Kode kegiatan, seperti 001. Menunjukkan kodea kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
 - 5.2.2. → Kode Akuntansi (4 untuk pendapatan, 5 untuk belanja, 5.1 → Belanja tidak langsung, 5.2 → belanja langsung, 5.2.1 → belanja pegawai, 5.2.2 → belanja barang dan jasa, 5.2.3 → belanja modal.
- f. Penataan kode rekening pada anggaran program satu SKPD ada perbedaan antar wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi, contoh pada SKPD BPBD:
- 1.19.1.19.04.00.01.(5.2.2) (Sleman/2015)
 - 1.19.1.19.03.01.26.5.2.2 (Kulonprogo/2015)
 - 1.19.1.19.03.01.01.5.2.2 (Bantul/2015)
 - 1.19.1.19.02.01.01.5.2.2 (Gunungkidul/2015)
 - 1.20.1.20.03.01.01.5.2.2 (Provinsi/2015)

- 1.20.1.20.11.001.001.5.2.2 (Kota/2014)

Pada proses pelaksanaan program open data, terjadi hambatan kerja. Hambatan terjadi pada akses dokumen dan aplikasi atau sistem (*prototype sistem*). Hambatan tersebut memberi dampak pada proses kerja selanjutnya, yaitu:

a. Dampak bagi individu (mahasiswi *internship*)

- Teknik, akses dokumen membutuhkan waktu yang lama. Hal tersebut karena tidak semua instansi dapat memberikan dokumen dalam bentuk *softfile* dan menunda waktu untuk memberikan dokumen. Selama waktu menunggu dokumen, mahasiswi mencari dokumen melalui internet dan membuat surat tembusan.
- Kinerja, karena ada masalah teknik maka kinerja menjadi kurang produktif. Masa pengerjaan membutuhkan waktu lebih dari target yang ditentukan.
- Sistem, proses input data membutuhkan waktu lama. Proses tersebut dilakukan secara manual, mengetik ulang dokumen APBD ke *Microsoft excel* dan CSV. Pada proses *upload* data, tidak semua data bisa terbaca oleh sistem.

b. Dampak bagi Perkumpulan Idea

- Ekonomi, menambah biaya tenaga dan akomodasi. Hal tersebut karena proses kerja melebihi waktu yang telah disepakati.
- Staff program dan tim analisis, tidak bisa melanjutkan proses kerja selanjutnya. Hal tersebut terhambat pada proses teknik input dan *upload* data.

c. Dampak bagi masyarakat

- Informasi, hambatan yang dialami dalam proses pengerjaan berdampak pada terlambatnya masyarakat menerima informasi anggaran pendapatan dan pengeluaran pemerintah pada program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota dan Provinsi Yogyakarta.

Pada sistem ini www.apbd.arcapada.info akan mendokumentasikan semua dokumen publik (APBD) di Provinsi Yogyakarta dari tahun 2014 – 2016. Sistem ini dapat memberikan akses dokumen ke masyarakat, baik dari tingkat desa melalui Program Desa Akuntabilitas Publik, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pada konteks open data perogram penanggulangan kemiskinan, di Indonesia belum ada pemerintah daerah yang melakukan inisiatif transparansi anggaran. Open data pada era informasi ini mempunyai peran yang strategis, yaitu mendorong

adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah.

Solusi yang dilakukan mahasiswi dan tim *scraping cleaning* data pada proses kerja ini adalah mengirim surat tembusan dan melakukan *searching* data melalui website Kabupaten/Kota dan Provinsi Yogyakarta. Jika dokumen yang didapatkan berupa *hardfile*, diperlukan beberapa tahap untuk melakukan *scraping* dan *cleaning* data. *Pertama*, dokumen APBD discan, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi libreOffice, kemudian *dicleaning*. Proses *cleaning* dilakukan, karena format tulisan menjadi berubah. Selanjutnya melakukan *cross chek* antara dokumen APBD dan data APBD yang sudah *discraping*. Hal tersebut dilakukan, untuk memastikan tidak ada perubahan pada kode rekening, nama kegiatan, dan jumlah anggaran pada program penanggulangan kemiskinan.

Solusi *kedua*, melakukan input manual dari dokumen APBD ke excel. Solusi ini memiliki kelemahan, yaitu resiko terjadinya salah ketik tinggi. Sehingga perlu dilakukan *cross chek* setelah melakukan input manual, untuk memperbaiki jika terjadi salah ketik. Proses ini kurang efektif, karena membutuhkan waktu lama. Untuk menyelesaikan 1 data SKPD dengan jumlah 75 halaman, membutuhkan waktu 5 hari. Periode dokumen APBD dengan jumlah data SKPD yang harus diinput sebanyak 13 SKPD. 1 data SKPD memiliki jumlah halaman antara 75 – 400 halaman.

Solusi yang dilakukan oleh mahasiswi untuk mengatasi hambatan jerja, memiliki resiko pada setiap proses pengerjaan. Solusi tersebut diambil untuk bisa efisiensi waktu, selama menunggu proses mengajukan permohonan data *softfile* dari instansi terkait. Solusi yang diberikan membutuhkan waktu pengerjaan lebih lama, tetapi dapat mencapai tujuan dari program. Tujuan dari program, yaitu publikasi dokumen mengenai anggaran dan program pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Hasil akhir dari proses kerja ini adalah publikasi informasi anggaran dan perogram penanggulangan kemiskinan kepada warga Yogyakarta. Publikasi informasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi warga Yogyakarta. Warga Yogyakarta dapat ikut serta mengawasi anggaran dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Yogyakarta. Proses kerja akan berhenti, jika menunggu dokumen SKPD dalam bentuk *softfile*. Hal tersebut akan memiliki dampak pada beberapa aspek. *Pertama*,

berdampak pada kinerja tim program, produktivitas kerja menurun. *Kedua*, berdampak pada keterlambatan warga Yogyakarta menerima informasi anggaran dan program penanggulangan kemiskinan.

Perkumpulan Idea sebagai organisasi sosial memiliki fleksibilitas pada proses penyelesaian tugas. Fleksibilitas tersebut dapat terjadi pada proses kerja yang memiliki hambatan. Pada proses kerja input data, fleksibilitas tersebut terkait dengan lama waktu pengerjaan dan metode pengerjaan. Keputusan adanya fleksibilitas dalam proses pengerjaan diambil pada saat rapat internal tim program. Tim program Ford Foundation penanggulangan kemiskinan di Provinsi Yogyakarta terdiri dari *project manager*, *project officer*, tim analisis, dan tim *scraping* dan *cleaning* data. Hasil keputusan tersebut kemudian disampaikan pada direktur dan deputi pengelola pengembangan program. Fleksibilitas pada proses kerja dilakukan agar tujuan dari program dapat tercapai.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengalaman pada proses kerja *internship* memberi pembelajaran bagi mahasiswi, bahwa matakuliah yang dipelajari di Program Studi Sosiologi memiliki keterkaitan dengan lingkungan kerja. Proses *internship* di Perkumpulan Idea Yogyakarta memberikan pemahaman kepada mahasiswi untuk lebih memahami proses kerja berjejaring.

Perkumpulan Idea Yogyakarta sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada bidang advokasi kebijakan anggaran di tingkat pusat dan daerah. Tujuan strategis Perkumpulan Idea menjadi lembaga yang memiliki keberpihakan pada kelompok rentan, serta mampu mempengaruhi perubahan kebijakan di tingkat nasional dan daerah dalam isu-isu strategisnya. Pada proses kerja, Perkumpulan Idea memiliki jejaring untuk dapat mencapai tujuan kerja. Kerja jejaring dengan LSM, pemerintah, media cetak dan elektronik, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat.

Pada proses *internship* menuntut mahasiswi untuk berkontribusi pada setiap program kerja idea. Hal tersebut dilakukan mahasiswi melalui proses kerja jejaring, input data, dan dokumentasi. Proses kerja tersebut berada dibawah pengawasan Deputy Pengelolaan Pengetahuan Idea, Tri Suci Wulandari.

Perkumpulan Idea Yogyakarta merupakan organisasi yang bekerjasama dengan berbagai pihak. Sosiologi organisasi mengenai tiga unit kajian organisasi, *pertama* kajian terhadap individu, *kedua* hubungan antar pribadi dalam kelompok, *ketiga* kajian kelompok dengan kelompok.

Kajian terhadap individu, yaitu bahwa individu mempunyai kedudukan yang penting dalam organisasi. Individu merupakan unsur manajemen dan sumber daya manusia yang melaksanakan semua kegiatan organisasi. Staff di Perkumpulan Idea memiliki kesempatan untuk dapat meningkatkan kapasitas diri. Setiap staff diharuskan memiliki satu ketertarikan isu sosial, misalnya isu gender, kemiskinan, kelompok marginal. Bentuk peningkatan kapasitas diri dapat diperoleh staff melalui kegiatan yang bersifat pelatihan, seminar, dan diskusi. Melalui kegiatan tersebut staff

Perkumpulan Idea dapat meningkatkan kapasitas diri dari segi wawasan, jejaring, dan teknis bekerja.

Kajian hubungan antar pribadi dalam organisasi. Menurut Liliweri, Alo (1997) organisasi bisa diartikan sebagai wadah, wahana, dan media perkumpulan sejumlah orang yang telah menetapkan keinginan dan kehendaknya untuk bekerja sama mencapai tujuan. Kata perkumpulan orang mengacu pada hakikat “kelompok” wadah jalinan interaksi antarpribadi.

Ditinjau dari segi sosiologi, organisasi merupakan satuan sosial atau komunitas khusus yang merupakan gabungan dan ikatan pribadi-pribadi staff yang mempunyai nilai dan norma yang sama. Tujuan ideal interaksi manusia antara lain: agar manusia menemukan diri dalam komunikasi lain, menemukan dunia luar, membangun makna hubungan, mengubah sikap dan perilaku bersama.

Melalui pemahaman pada empat prinsip tujuan tersebut, maka manusia yang berorganisasi selalu berasumsi bahwa keempat tujuan itu dapat diwujudkan dalam kehidupan organisasi. Melalui prinsip tersebut staff di Perkumpulan Idea menganggap melalui organisasi, dia dapat bekerjasama dengan orang lain.

Pada proses kerja, mahasiswa memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri. Mahasiswa terlibat dalam kerja jejaring Perkumpulan Idea, yaitu menghadiri kegiatan diskusi dan seminar yang diadakan oleh mitra idea. Pada proses ini mahasiswa dapat membangun dan menambah relasi dengan jejaring Perkumpulan Idea. Pada proses kerja input data, mahasiswa berada dibawah bimbingan Deputy Pengembangan Program, Tenti Novari Kurniawati. Mahasiswa diberi arahan mengenai proses input data SKPD tahun Gunungkidul yang berpihak pada penyandang disabilitas. Proses kerja dokumentasi, mahasiswa menjadi notulis dan melakukan transkrip pada kegiatan rapat dan evaluasi kegiatan.

Secara teknis, proses kerja dokumentasi menambah pengetahuan dan keterampilan pada mahasiswa. Mahasiswa menjadi mengerti teknis penulisan rekam proses kegiatan. Hasil rekam proses kegiatan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan kegiatan selanjutnya.

Pada proses kerja *internship* 40 hari kerja, mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai peran dan pembagian kerja pada suatu lembaga. *Internship* di LSM

memberikan pengalaman bagi mahasiswi mengenai proses kerja dan dinamika pada proses pelaksanaan program kerja.

4.2. Saran

Berdasarkan proses kerja *internship* yang dilakukan 40 hari kerja, mahasiswi memberikan saran bagi:

A. Perkumpulan Idea Yogyakarta

Pada kontrak kerja menurut mahasiswi, Perkumpulan Idea harus membuat kontrak kerja dengan mahasiswa/i yang akan melakukan kerja magang. Kontrak kerja tersebut berisi lama waktu magang, tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa/i magang, evaluasi terhadap tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa/i *internship*. Hal tersebut diperlukan, agar kedua pihak bisa saling mencapai tujuan sesuai kesepakatan.

B. Program Studi Sosiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Program Studi Sosiologi UAJY perlu menambahkan rencana kegiatan pelatihan atau praktek kerja pada mahasiswa/i untuk dapat dijadikan sebagai panduan saat *internship*. Pendampingan dan pemeriksaan secara detail terhadap proposal *internship* yang dibuat oleh mahasiswa/i yang akan *internship*. Hal tersebut agar mahasiswa/i tidak kesulitan ketika membuat laporan *internship*. Serta dapat dijadikan panduan ketika akan dijadikan sebagai bahan penulisan karya tulis ilmiah.

C. Mahasiswa/i Sosiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Mahasiswa/i melakukan survey sebelum *internship*. Selanjutnya melakukan interview secara jelas dan detail dengan pihak lembaga mengenai program kerja yang akan dikerjakan oleh mahasiswa/i *internship*. Hal tersebut bertujuan agar mahasiswa/i yang akan melakukan *internship* tidak mengalami kesulitan dalam menentukan fokus kerja *internship*.

Proses kerja *internship* bisa dijadikan sebagai pengalaman dan referensi untuk disampaikan kepada calon mahasiswa/i *internship*. Hal tersebut untuk bisa membantu mempersiapkan program kegiatan yang kreatif dan tujuan tersebut dapat tercapai. Proses kerja yang baik akan meninggalkan kesan positif bagi lembaga dan staff yang dijadikan sebagai tempat *internship*.

Daftar Instansi/SKPD Setiap Daerah yang Harus di *Scraping* dan *Cleaning*

| PROVINSI DI YOGYAKARTA | KOTA YOYAKARTA | KAB. SLEMAN | KAB. BANTUL | KAB. GUNUNGKIDUL | KAB. KULONPROGO |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Dinas Sosial | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | Dinas Sosial | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi | Dinas Pendidikan |
| Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi | Dinas Pekerja Umum | Dinas Kesehatan |
| BKPP (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan) | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan | BKBPMPP | BKKPPKB | Dinas Kesehatan | BPMBPDKB |
| BPPM (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat) | Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah | Dinas Tenaga Kerja dan Sosial | Dinas Kesehatan | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |
| Dinas Pertanian | Dinas KB | Sekretariat Daerah | Dinas Pendidikan | BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana) | BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Dinas Kelautan Perikanan | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | BKP3 | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura | Satpol PP |
| Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi | PMP | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan | Dinas Kelautan Perikanan | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan | Sekretariat Daerah |
| Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) | Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral | Dinas Peranian | Kantor Pasar | Dinas Pekerja Umum |
| Dinas Kesehatan | BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | Kantor Pasar | BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) | Kantor lingkungan Hidup |
| Dinas Pekerja Umum | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi | BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) |
| BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dinas Pengelola Pasar | BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dinas Pekerja Umum | BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pternakan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) | | BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) | KPPD via Sekretariat Daerah | Dinas Kehutanan | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| Dinas Pariwisata | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | PMD | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah |
| | | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi | BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) | | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga |
| | | Kantor Pasar | BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan ESDM |
| | | | Dinas Pariwisata | | Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan |
| | | | | | Dinas Pertanian dan Kehutanan |

DAFTAR PUSTAKA

Program Studi Sosiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2015. *Panduan Internship dan Karya Tulis Ilmiah*.

Liliweri, Alo. 1997. *SOSIOLOGI ORGANISASI*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakhti.

Muhammad, Arni. 2005. *KOMUNIKASI ORGANISASI*. Jakarta: Bumi Aksara.

Website Perkumpulan Idea. *Tentang Perkumpulan Idea*. Diakses pada 15 Desember 2016. (www.perkumpulanidea.or.id)



LOGBOOK (*Internship* Perkumpulan Idea Yogyakarta)

| o | Tanggal | Aktivitas | Tempat |
|---|---|------------------------------|-------------|
| | 29 Februari 2016 | Rapat mingguan internal Idea | Kantor Idea |
| | <p>Rincian Aktivitas</p> <p>➤ Partisipan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sunarja (Direktur Idea) b. Triwahyuni Suci .W c. Desi Retno Palupi d. Bambang Hery .P e. Galih Pramilu f. Yoga Putra .P g. Tenti .K h. Ria Rahmawati i. Isnawati j. Sumarti Sukaningsih k. Atqiya l. Eko Budi .M m. W. Zakiyah n. Meigita Dyah Utami o. Susi Listiana p. Ferina <p>➤ Pembahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Briefing magang <ul style="list-style-type: none"> - Idea membuka kesempatan magang 1 tahun 2X dengan kuota minimal 3 orang dan maksimal 5 orang - Mahasiswa magang harus membuat TOR untuk program magang di Idea b. Hasil Renstra Idea <ul style="list-style-type: none"> - Visi dan misi Idea - Struktur kepengurusan Idea, terkait dengan staff program mana yang menjadi staff penuh dan paruh waktu adalah staff tetap, kalau staff program terserah yang penting program selesai. Pembahasan mengenai SOP, banyak hal yang harus dibenahi, yaitu sumber daya, staff, keuangan, dsb. c. Perkembangan program dilapangan <ul style="list-style-type: none"> - Program Ford sudah diadakan <i>set up</i> program, program yang bisa berjalan antara TKPKD Gunungkidul dengan TKPKD CRI. Akan diadakan rapat program untuk menentukan jobdesk, SID akan dibentuk tim yang membahas penanggulangan kemiskinan dan mempersiapkan data kemiskinan. - Program AFC bulan ini adalah closing untuk program awal bulan HI yang tag line khusus disabilitas. Program AFC didanai 2 lembaga donor, pertama BMZ yang fokus pada teman-teman penyandang disabilitas, kedua EU fokus pada kalangan marginal. Idea akan fokus pada proses advokasi perubahan pada perencanaan anggaran pada disabilitas dan kelompok rentan. d. Kegiatan yang sudah berjalan <ul style="list-style-type: none"> - Training awarness (meningkatkan kesadaran <i>stakeholder</i>) di Gunungkidul terhadap isu | | |

LOGBOOK (*Internship* Perkumpulan Idea Yogyakarta)

disabilitas. Idea memetakan peluang UU Desa, wilayah kerja berada di Nglipar dan Plembutan. Berdasarkan hasil training, sudah cukup tercapai.
Penyusunan *tools assessment* yang dibedakan menjadi 2 cara yakni FGD dan In Depth Interview.

| | | |
|--------------|---|-------------|
| 1 Maret 2016 | 1. Membuat dan mengirim TOR <i>internship</i> | Kantor Idea |
| | 2. Rapat Program Ford Fondation | |

Rincian Aktivitas

- Membuat ToR *internship*
 - a. Latar belakang permasalahan
 - b. Kegiatan yang akan dilaksanakan: persiapan (study literature), observasi. Pelaksanaan riset, pelaporan hasil riset.
 - c. Metode pelaksanaan: wawancara, FGD, penyebaran kuesioner
 - d. Jadwal kegiatan Maret – April 2016
 - e. Selanjutnya mengirim hasil ToR ke mba Triwahyuni Suci W., sebagai Deputy Pengelola Pengetahuan Perkumpulan Idea.
- Rapat Ford Fondation
 - Partisipan rapat:
 - a. Isnawati
 - b. Galih pramilu
 - c. Triwahyuni Suci W.
 - d. Meigita Dyah Utami
 - e. Bambang Hery P.
 - f. Yoga Putra P.
 - g. Ferina

| | | |
|--------------|---|---------------------------------|
| 2 Maret 2016 | 1. Diskusi bulanan Tribun Jogja | Ruang rapat kantor Tribun Jogja |
| | 2. Membuat tulisan hasil dari diskusi bulanan di Tribun | Kantor Idea |

Rincian Aktivitas

- Diskusi bulanan Tribun Jogja
 - a. Tema diskusi forum Tribun – Satunama “ Masa Depan Inklusi di DIY: Pengalaman Praktik Kebijakan di Kab. Kulonprogo”.
 - b. Pembicara dalam diskusi tersebut:
 - Khaitul Salim – perwakilan LKIS
 - Triwardoyo – Diskampol Kulonprogo
 - Muskin – MUI DIY
 - c. Tujuan diskusi, yaitu:
 - Melihat potret inklusi di DIY dari pengalaman di lapangan.
 - Mendiskusikan praktik baik kebijakan inklusi di Kabupaten Kulonprogo.
 - Mengetahui tantangan dan hambatan praktik inklusi di DIY.
 - Merumuskan bersama masa depan inklusi di DIY.

| | | |
|--------------|---|-------------|
| 3 Maret 2016 | 1. Membuat tulisan dari hasil diskusi “Masa Depan Inklusi di DIY: Pengalaman Praktik Kebijakan di Kab. Kulonprogo”. | Kantor Idea |
| | 2. Merapikan buku idea | |

LOGBOOK (*Internship* Perkumpulan Idea Yogyakarta)

Rincian aktivitas:

- Membuat draft tulisan:
 - a. Undang-undang kebebasan memeluk agama.
 - b. Permasalahan komunitas penghayat.
 - c. Inklusi sosial.
 - d. Mengelompokkan buku-buku berdasarkan kode dan judul buku.

4 Maret 2016

1. Diskusi digital right dengan Engagemedia
2. Briefing program kerja *internship*

Kantor Idea

Rincian aktivitas

- Diskusi digital right dengan Engagemedia
 - a. Partisipan
 - Tenti Novi K.
 - Triwahyuni Suci W.
 - Galih Pramilu
 - Isnawati
 - Yoga Putra P.
 - Ferina Anistya F.
 - b. Peran mahasiswi, menjadi noteker
 - c. Pembahasan:

Konsep *digital right* yaitu kebebasan berekspresi mengenai penggunaan internet yang dilindungi oleh negara dan masyarakat. Internet diibaratkan sebagai hak asasi manusia, karena setiap melakukan transaksi data menggunakan akses internet.
- Briefing program kerja *internship*
 - a. Partisipan
 - Triwahyuni Suci K.
 - Tenti Novi K.
 - Ferina Anistya F.
 - b. Pembahasan : Analisis anggaran
 1. Pendapatan Daerah
 - PAD (Pendapatan Asli Daerah)
 - Dana Perimbangan
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 2. Belanja Daerah yang Pro Difabel
 - Dinas Pendidikan
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas PU
 - Dinas Sosial

7 Maret 2016

1. Input data SKPD Gunungkidul
2. Rapat mingguan Idea
3. Mencari data skunder KDRT Kab. Gunungkidul

Kantor Idea

Rincian Aktivitas:

- Input data SKPD Gunungkidul Dinas Pendidikan tahun 2015
- Mencari data skunder KDRT Kab. Gunungkidul

Data tersebut akan digunakan untuk aksi memperingati IWD (*International Woman Day*). Aksi akan dilaksanakan di Alun-alun Gunungkidul, pada 8 Maret 2016.

Data yang diperlukan, yaitu:

LOGBOOK (*Internship* Perkumpulan Idea Yogyakarta)

- Data KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Kabupaten Gunungkidul.
- Data Dispensasi Nikah Kabupaten Gunungkidul.
- Data KDP (Kekerasan Dalam Pacaran)
- Pelecehan seksual

8 Maret 2016

Briefing program *Advocation for Change* (AFC)

Kantor Idea

Rincian Aktivitas:

➤ Partisipan:

- a. Triwahyuni Suci K.
- b. W. Zakiah
- c. Eko Budi M.
- d. Ferina Anistya F.

➤ Pembahasan:

1. Tujuan:

a. Umum:

- BMZ: untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam upaya pembangunan lokal yang inklusi dan mendorong upaya tersebut di tingkat nasional.
- CSOLA: untuk mendorong pemerintah di Indonesia menjadi lebih efektif, transparan dan responsif terhadap prioritas masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini atau biasanya terpinggirkan.

b. Khusus:

- BMZ: meningkatkan dan memonitor disabilitas terhadap proses pemerintahan lokal dan akses terhadap layanan sosial.
- CSOLA: meningkatkan kapasitas *Local Authorities*/ pemerintah setempat (LA) dan CSOs dengan fokus peningkatan keterwakilan kelompok terpinggirkan agar terlibat sepenuhnya dalam proses pengelolaan anggaran yang terbuka, inklusif, dan partisipatif di NTT dan DIY.

2. Hasil yang diharapkan:

a. BMZ:

- Proses pemerintahan dan pelayanan sosial setempat di Kabupaten Gunungkidul dan Kota Kupang melibatkan penyandang disabilitas.
- Aksesibilitas infrastruktur publik dan layanan sosial untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul dan Kota Kupang meningkat.
- Berkembangnya mekanisme akuntabilitas proses pemerintahan dan penyediaan layanan sosial di DIY dan NTT yang melibatkan OPD dan CSO setempat.

b. CSOLA:

- Peningkatan kapasitas CSOs, termasuk perwakilan dari kelompok terpinggirkan dalam hel pengelolaan keuangan publik.
- Pemerintah setempat (LA) dan badan-badan pemegang anggaran di wilayah project terlibat dalam sebuah kerjasama terbuka yang saling menguntungkan dengan CSOs, dan mampu melakukan komitmen yang tepat sasaran untuk penggunaan anggaran publik yang lebih baik.

Tokoh masyarakat, jurnalis, dan pemerintah setempat digerakan dalam hasil proses analisis anggaran lokal dan mampu memperkuat aliansi dan jaringan ditingkat lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan dan mendorong rekomendasi project.

10 Maret 2016

1. Input data SKPD Yogyakarta tahun 2013

Kantor Idea

2. Input data SKPD Gunungkidul 2015

LOGBOOK (*Internship* Perkumpulan Idea Yogyakarta)

| | | |
|--|--|--|
| Rincian aktivitas: ➤ Data SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) a. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah b. Badan Lingkungan Hidup c. Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah d. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan | | |
| 11 Maret 2016 | 1. Input data SKPD Gunungkidul 2015 2. Mencari data skunder staff Idea | Kantor Idea |
| 14 Maret 2016 | 1. Input data SKPD Gunungkidul 2015 2. Rapat Mingguan internal Idea | Kantor Idea |
| 15 Maret 2016 | Input data SKPD Gunungkidul 2015 – 2016 | Kantor Idea |
| 16 Maret 2016 | Input data SKPD Gunungkidul 2015 – 2016 | Kantor Idea |
| 17 Maret 2016 | 1. Input data SKPD Gunungkidul 2015 – 2016 2. Diskusi Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) | Kantor Idea The 101 Yogyakarta Tugu Hotel |
| Rincian Aktivitas ➤ Diskusi Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Tema diskusi “Bersama Menguatkan Pemilu yang Demokratis”. | | |
| 18 Maret 2016 | 1. Input data SKPD Gunungkidul 2015 – 2016 2. Persiapan kegiatan diskusi pengawasan pemilu | Kantor Idea |
| 19 Maret 2016 | Diskusi Pengawasan Pemilu | Kantor Bawaslu DIY |
| Rincian Aktivitas: ➤ Diskusi Pengawasan Pemilu a. Tema diskusi “Awasi Pemilukada: Upaya Mencari Pemimpin Daerah yang Anti Korupsi dan Mensejahterakan Rakyat”. b. Pembicara dalam diskusi tersebut: - Pembicara 1 : Wawan Budianto (KPU Kota Yogya) - Pembicara 2 : M. Najib (Bawaslu DIY) - Pembicara 3 : Titi Anggraini (Perludem Jakarta) | | |
| 21 Maret 2016 | 1. Input data SKPD 2. Rapat internal idea 3. Rapat persiapan workshop revitalisasi SID (Sistem Informasi Desa) 28, 29, dan 30 Maret 2016 | Kantor Idea |
| Rincian Aktivitas: ➤ Rapat internal idea a. Perkembangan program 1. Program ford fondation - Minggu lalu menghadiri acara E-Gov 144 Desa yang diselenggarakan Kominfo. | | |

LOGBOOK (*Internship* Perkumpulan Idea Yogyakarta)

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|-----------------------------|---|----------------------|
| <p>Kominfo sudah mendaftarkan domain untuk 144 desa di (desa.id). hal ini dibicarakan mengenai website, sistem informasi. Hal tersebut akan sia-sia jika tidak dimanfaatkan dan bermanfaat untuk desa.</p> <ul style="list-style-type: none">- Persiapan workshop tanggal 28, 29, dan 30 Maret 2016 akan dibantu BAPPEDA Gunungkidul dan dihadiri beberapa desa dari Bantul. <p>2. Program TAF</p> <ul style="list-style-type: none">- Budget pertama sudah dikirim oleh inisiatif.- Tahap kedua sudah masuk 98 juta. Rapat dengan LKIS ada perubahan anggaran, keuangan juga mendapatkan management fee. <p>3. Program Oxfam</p> <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan sabtu, persiapan dialog publik dan senin dilakukan dialog publik.- Pendaftaran asuransi bencana, rabu bertemu dengan PT. Aca untuk konfirmasi pendaftarannya. Kemudian diteruskan pada pak Brickson untuk meminta profil komunitas dan fc KTP. Idea hanya menjembatani dan tidak mengambil keuntungan, sehingga kedepannya langsung konfirmasi dengan komunitas.- Idea akan mensuplai kebutuhan data untuk pendaftaran. <p>➤ Rapat persiapan workshop revitalisasi SID (Sistem Informasi Desa)</p> <p>a. Tema workshop, FGD revitalisasi SID untuk optimalisasi TKPK Desa se-Gunungkidul</p> <p>b. Partisipan workshop:</p> <ul style="list-style-type: none">- 144 Desa se-Kabupaten Gunungkidul- Desa Dlingo, Kabupaten Bantul- Desa Wonokerto, Kabupaten Sleman <p>c. Hasil capaian yaitu, progres implementasi SID di 144 Desa se-Kabupaten Gunungkidul</p> <p>d. Aspek:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kelembagaan- Regulasi- Sumber daya (sdm dan anggaran)- Infrastruktur | | | | | | |
| 7. | 23 Maret 2016 | <table><tr><td>1. Transkrip kegiatan diskusi</td><td>Kantor Idea</td></tr><tr><td>2. Rapat koordinasi tentang penyusunan draft gugatan praperadilan mantan Bupati Bantul, Idam Samawi</td><td>Pukat Korupsi FH UGM</td></tr></table> | 1. Transkrip kegiatan diskusi | Kantor Idea | 2. Rapat koordinasi tentang penyusunan draft gugatan praperadilan mantan Bupati Bantul, Idam Samawi | Pukat Korupsi FH UGM |
| 1. Transkrip kegiatan diskusi | Kantor Idea | | | | | |
| 2. Rapat koordinasi tentang penyusunan draft gugatan praperadilan mantan Bupati Bantul, Idam Samawi | Pukat Korupsi FH UGM | | | | | |
| <p>Rincian Aktivitas</p> <p>➤ Rapat koordinasi tentang penyusunan draft gugatan praperadilan mantan Bupati Bantul, Idam Samawi</p> <p>a. Pembahasan</p> <p>Pertemuan jaringan anti korupsi, yaitu Aliansi Idea, ICM, Pukat UGM, MTB sedang berusaha menyusun draft gugatan praperadilan terhadap mantan Bupati Bantul, Idam Samawi. Kasus bermula dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Idam Samawi periode 2000 – 2010. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Aliansi ini berusaha untuk menggugat SP3.</p> | | | | | | |
| 8. | 24 Maret 2016 | <table><tr><td>Briefing cara menganalisis SKPD</td><td>Kantor Idea</td></tr></table> | Briefing cara menganalisis SKPD | Kantor Idea | | |
| Briefing cara menganalisis SKPD | Kantor Idea | | | | | |
| 9. | 28 Maret 2016 | <table><tr><td>FGD Revitalisasi SID untuk Optimalisasi TKPK Desa se-Gunungkidul</td><td>Ruang DPPKAD Gunungkidul</td><td>Rapat Lt.3</td></tr></table> | FGD Revitalisasi SID untuk Optimalisasi TKPK Desa se-Gunungkidul | Ruang DPPKAD Gunungkidul | Rapat Lt.3 | |
| FGD Revitalisasi SID untuk Optimalisasi TKPK Desa se-Gunungkidul | Ruang DPPKAD Gunungkidul | Rapat Lt.3 | | | | |
| <p>Rincian Aktivitas:</p> <p>➤ FGD Revitalisasi SID untuk Optimalisasi TKPK Desa se-Gunungkidul adalah upaya untuk mendorong sistem informasi kemiskinan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk</p> | | | | | | |

LOGBOOK (*Internship* Perkumpulan Idea Yogyakarta)

| | | | |
|----|--|--|--|
| | mendukung program penanggulangan kemiskinan. | | |
| | a. Jumlah partisipan: 60 orang <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Girisubo : 8 Desa - Kecamatan Rangkap : 8 Desa - Kecamatan Tanjung Sari : 5 Desa - Kecamatan Semanu : 5 Desa - Kecamatan Tepus : 5 Desa - Kecamatan Ponjong : 11 Desa b. Tujuan workshop: <ul style="list-style-type: none"> - FGD revitalisasi SID untuk optimalisasi TKPK Desa se-Kabupaten Gunungkidul - Menakar capaian implementasi SID di 144 desa se-Kabupaten Gunungkidul - Merekomendasikan langkah strategis untuk penguatan SID. | | |
| 1 | 29 Maret 2016 | FGD Revitalisasi SID untuk Optimalisasi TKPK Desa se-Gunungkidul | Ruang DPPKAD Gunungkidul Rapat Lt.3 |
| | Rincian Aktivitas: ➤ FGD Revitalisasi SID untuk Optimalisasi TKPK Desa se-Gunungkidul adalah upaya untuk mendorong sistem informasi kemiskinan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan. <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah partisipan: 75 orang <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Purwosari : 5 Desa - Kecamatan Panggang : 6 Desa - Kecamatan Saptosari : 7 Desa - Kecamatan Paliyan : 7 Desa - Kecamatan Playen : 13 Desa - Kecamatan Wonosari : 14 Desa b. Tujuan workshop: <ul style="list-style-type: none"> - FGD revitalisasi SID untuk optimalisasi TKPK Desa se-Kabupaten Gunungkidul - Menakar capaian implementasi SID di 144 desa se-Kabupaten Gunungkidul - Merekomendasikan langkah strategis untuk penguatan SID. | | |
| 1 | 30 Maret 2016 | FGD Revitalisasi SID untuk Optimalisasi TKPK Desa se-Gunungkidul | Ruang DPPKAD Gunungkidul Rapat Lt.3 |
| | Rincian Aktivitas: ➤ FGD Revitalisasi SID untuk Optimalisasi TKPK Desa se-Gunungkidul adalah upaya untuk mendorong sistem informasi kemiskinan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan. <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah partisipan: 75 orang <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Karang Mojo : 9 Desa - Kecamatan Ngawen : 6 Desa - Kecamatan Nglipar : 7 Desa - Kecamatan Gendang Sari : 7 Desa - Kecamatan Pathuk : 11 Desa - Kecamatan Semin : 11 Desa b. Tujuan workshop: <ul style="list-style-type: none"> - FGD revitalisasi SID untuk optimalisasi TKPK Desa se-Kabupaten Gunungkidul - Menakar capaian implementasi SID di 144 desa se-Kabupaten Gunungkidul - Merekomendasikan langkah strategis untuk penguatan SID. | | |
| 2. | 31 Maret 2016 | Diskusi kultural” Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas | RM. Mataram Indah Jl. Wonosari km.7 |

LOGBOOK (*Internship* Perkumpulan Idea Yogyakarta)

| | | | |
|---|--------------|--|------------------------------------|
| | | Penyandang Disabilitas”. | Baturetno, Banguntapan, Bantul |
| <p>Rincian Aktivitas:</p> <p>➤ Diskusi kultural” Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Penyandang Disabilitas”. Diselenggarakan oleh SAPDA –KPKM UGM</p> <p>a. Pembicara dalam diskusi ini, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ibu Yuli – orang tua dari anak penyandang disabilitas (tuna grahita) Berdiskusi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi bagi anaknya yang menyandang disabilitas tuna grahita.- Mba Ria – Rungu wicara Berdiskusi mengenai kesehatan reproduksi pada remaja tuli, pencegahan terjadinya pelecehan seksual pada remaja tuli.- Bapak Prawoto – orang tua dengan anak penyandang disabilitas (Tuna rungu) Berdiskusi mengenai perlakuan diskriminasi terhadap anaknya di lingkungan rumah. Fasilitas dan pelayanan dari pemerintah dan pihak Sekolah Luar Biasa (SLB) belum berpihak pada anak disabilitas.- Mba Rini – SAPDA Memberikan materi mengenai hal yang sudah dilakukan SAPDA terkait dengan pelecehan seksual bagi anak penyandang disabilitas. | | | |
| 3. | 1 April 2016 | Membuat timesheet kegiatan FORD FGD Revitalisasi SID untuk Optimalisasi TKPK Desa se-Gunungkidul | Kantor Idea |
| 4. | 4 April 2016 | Transkrip Diskusi Bawaslu | Kantor Idea |
| 5. | 5 April 2016 | Audieansi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman, mengenai penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah | Kantor Pemerintah Kabupaten Sleman |
| <p>Rincian Aktivitas</p> <p>Audiensi dilakukan untuk memberikan informasi dan masukan terhadap beberapa persoalan pendidikan di Kabupaten Sleman. Persoalan tersebut mengenai pungutan liar, ijazah yang ditahan piha sekolah, intimidasi terhadap orang tua murid.</p> <p>Kegiatan ini dilakukan bersama dengan Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta, diantaranya LBH Yogyakarta, PKBI DIY, LSPPA, Aksara, MTB.</p> | | | |
| 6. | 6 April 2016 | 1. Rapat evaluasi kegiatan Ford | Rumah Makan Madam Tan Jogja |
| | | 2. Membuat draft analisis | |
| <p>Rincian aktivitas</p> <p>➤ Hasil rapat evaluasi kegiatan Ford</p> <p>a. Capaian Output:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peta kondisi SID dimasing-masing desa dari askpe (regulasi, kelembagaan, infrastruktur, anggaran, dan SDM).2. Ada 3 kategori desa, menjadi 3 ring<ul style="list-style-type: none">- Memenuhi 5 aspek (80 desa)- Belum terpenuhi 5 aspek (44 desa)- Selum memenuhi pengetahuan tentang SID (20 desa)3. Rekomendasi untuk melakukan intervensi terhadap desa yang belum memenuhi 5 aspek, hal ini akan dilakukan oleh jejaring. <p>➤ Draft analisis:</p> <p>a. Kebijakan terkait dengan penyandang disabilitas</p> | | | |

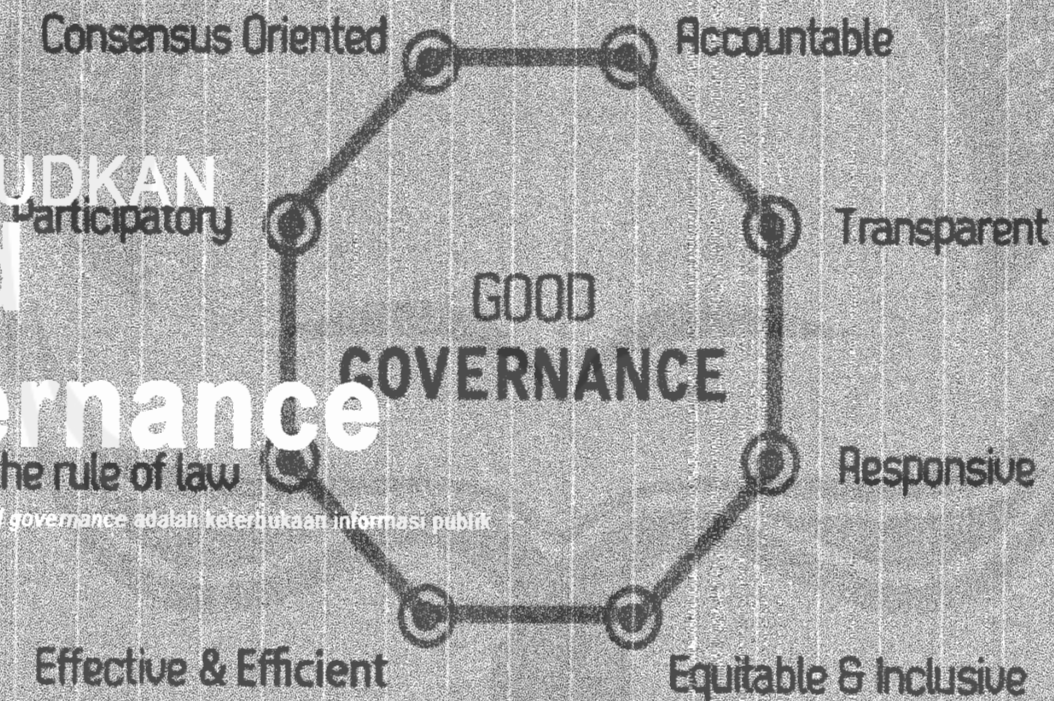
LOGBOOK (Internship Perkumpulan Idea Yogyakarta)

| | | | |
|-----|--|---|-------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - CRPD - PERDASOS DIY <p>b. Konteks masalah penyandang disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aksesibilitas - Anggaran - Partisipasi penyandang disabilitas <p>Perencanaan pembangunan</p> | | |
| 7. | 7 April 2016 | Melanjutkan membuat draft analisis | Kantor Idea |
| | <p>Rincian aktivitas</p> <p>➤ Draft analisis:</p> <p>a. Kebijakan terkait dengan penyandang disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - CRPD - PERDASOS DIY <p>b. Konteks masalah penyandang disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aksesibilitas - Anggaran - Partisipasi penyandang disabilitas <p>Perencanaan pembangunan</p> | | |
| 8. | 8 April 2016 | Transkrip | Kantor Idea |
| 9. | 11 April 2016 | Rapat Internal Idea | Kantor Idea |
| 10. | 12 April 2016 | Transkrip | Kantor Idea |
| 11. | 13 April 2016 | 1. Transkrip | Kantor Idea |
| | | 2. Diskusi program AFC | |
| 12. | 14 April 2016 | 1. Transkrip | Kantor Idea |
| | | 2. Audiensi dengan Bupati Bantul | Kantor Bupati Bantul |
| 13. | 15 April 2016 | Input Data | Kantor Idea |
| 14. | 18 April 2106 | 1. Transkrip | Kantor Idea |
| | | 2. Rapat internal Idea | |
| 15. | 19 April 2016 | Diskusi upaya menyusun modul pelatihan pengarusutamaan gender ditingkat dasar | Audit A BPPM Yogyakarta |
| 16. | 21 April 2016 | Jaga stand Idea | Jogja Nasional Museum |
| 17. | 22 April 2016 | Input data | Kantor Idea |
| 18. | 25 April 2016 | Input data | Kantor Idea |
| 19. | 26 April 2016 | Input data | Kantor Idea |
| 20. | 27 April 2016 | FGD Open Data | Hotel Grand Quality |
| 21. | 28 April 2016 | Presentasi hasil analisis SKPD | Kantor Idea |

MEWUJUDKAN good governance

Follows the rule of law

Salah satu indikator good governance adalah keterbukaan informasi publik



DAFTAR LEMBAGA DI WILAYAH KAB/KOTA. YOGYAKARTA, PROP. D I YOGYAKARTA

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah YOGYAKARTA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah YOGYAKARTA | Dinas Kesehatan YOGYAKARTA | Dinas Pendidikan YOGYAKARTA | Dinas Pengelolaan Pasar YOGYAKARTA |
| | | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian YOGYAKARTA | Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah YOGYAKARTA | Kantor Keluarga Berencana YOGYAKARTA |
| | | | | Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan YOGYAKARTA |

TEMPELKAN DI WEB
LAIN

Gunakan skrip berikut ini untuk
memasang tautan dari situs web
anda ke halaman ini:

```
<div style="border:solid 1px  
#ccc;border-radius:.5em;-  
webkit-box-shadow: 5px 6px 8px  
< >
```

pratayang:

 OPEN DATA APBD
Kab/Kota. YOGYAKARTA,
Prop. D I YOGYAKARTA

OPEN DATA APBD

BERANDA LEMBAGA ▾ ANALISIS QUERY DATA

GRAFIK VISUALISASI ANGGARAN DAN PENDAPATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - YOGYAKARTA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah YOGYAKARTA



Daftar Instansi/SKPD Setiap Daerah yang Harus di *Scrapping* dan *Cleaning*

| PROVINSI DI YOGYAKARTA | KOTA YOYAKARTA | KAB. SLEMAN | KAB. BANTUL | KAB. GUNUNGKIDUL | KAB. KULONPROGO |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Dinas Sosial | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | Dinas Sosial | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi | Dinas Pendidikan |
| Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi | Dinas Pekerja Umum | Dinas Kesehatan |
| BKPP (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan) | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan | BKBPMPP | BKKPPKB | Dinas Kesehatan | BPMBPDKB |
| BPPM (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat) | Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah | Dinas Tenaga Kerja dan Sosial | Dinas Kesehatan | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi |
| Dinas Pertanian | Dinas KB | Sekretariat Daerah | Dinas Pendidikan | BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana) | BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Dinas Kelautan Perikanan | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | BKP3 | Dinas Tanaman Pangan Holtikultura | Satpol PP |
| Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi | PMP | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan | Dinas Kelautan Perikanan | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan | Sekretariat Daerah |
| Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) | Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral | Dinas Peranian | Kantor Pasar | Dinas Pekerja Umum |
| Dinas Kesehatan | BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | Kantor Pasar | BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) | Kantor lingkungan Hidup |
| Dinas Pekerja Umum | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi | BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) |
| BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dinas Pengelola Pasar | BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dinas Pekerja Umum | BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pternakan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) | | BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) | KPPD via Sekretariat Daerah | Dinas Kehutanan | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| Dinas Pariwisata | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | PMD | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah |
| | | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi | BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) | | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga |
| | | Kantor Pasar | BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan ESDM |
| | | | Dinas Pariwisata | | Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan |
| | | | | | Dinas Pertanian dan Kehutanan |

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KAB. GUNUNG KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2016

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | JENIS BELANJA | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------------|--|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| | | PEGAWAI | BARANG DAN JASA | MODAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 |
| 1 | URUSAN WAJIB | | | | |
| 1.01 | PENDIDIKAN | | | | |
| 1.01.0100 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | | |
| 1.01.1.01.0100.001 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 8,399,900,000 | 7,226,764,550 | 2,684,046,600 | 18,310,711,150 |
| 1.01.1.01.0100.001.010000 | Penyediaan jasa surat menyurat | - | 1,985,000 | - | 1,985,000 |
| 1.01.1.01.0100.001.020000 | Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | - | 2,502,392,400 | - | 2,502,392,400 |
| 1.01.1.01.0100.001.030000 | Penyediaan jasa peralatan, perlengkapan kantor, gedung, dan tanah | - | 71,800,000 | - | 71,800,000 |
| 1.01.1.01.0100.001.040000 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | - | 26,060,000 | - | 26,060,000 |
| 1.01.1.01.0100.001.060000 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | 234,804,000 | - | 234,804,000 |
| 1.01.1.01.0100.001.070000 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | - | 516,253,400 | - | 516,253,400 |
| 1.01.1.01.0100.001.080000 | Penyediaan alat tulis kantor | - | 1,232,702,800 | - | 1,232,702,800 |
| 1.01.1.01.0100.001.090000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | - | 614,044,950 | - | 614,044,950 |
| 1.01.1.01.0100.001.100000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan | - | 411,268,500 | - | 411,268,500 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | kantor | | | | |
| 1.01.1.01.0100.001.110000 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | 2,683,746,600 | 2,683,746,600 |
| 1.01.1.01.0100.001.120000 | Penyediaan peralatan rumah tangga | - | 591,211,500 | - | 591,211,500 |
| 1.01.1.01.0100.001.130000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | - | 170,916,000 | 300,000 | 171,216,000 |
| 1.01.1.01.0100.001.150000 | Penyediaan makanan dan minuman | - | 165,466,000 | - | 165,466,000 |
| 1.01.1.01.0100.001.160000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | 615,450,000 | - | 615,450,000 |
| 1.01.1.01.0100.001.170000 | Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran | 8,376,900,000 | - | - | 8,376,900,000 |
| 1.01.1.01.0100.001.180000 | Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD | 23,000,000 | 72,410,000 | - | 95,410,000 |
| 1.01.1.01.0100.002 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | 1,113,601,500 | 3,229,211,900 | 4,342,813,400 |
| 1.01.1.01.0100.002.020000 | Pembangunan gedung kantor | - | - | 1,402,487,500 | 1,402,487,500 |
| 1.01.1.01.0100.002.050000 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | - | 9,235,000 | 467,150,000 | 476,385,000 |
| 1.01.1.01.0100.002.080000 | Pengadaan mebelair | - | - | 944,864,400 | 944,864,400 |
| 1.01.1.01.0100.002.100000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - | 660,874,000 | - | 660,874,000 |
| 1.01.1.01.0100.002.110000 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | - | 228,890,000 | - | 228,890,000 |
| 1.01.1.01.0100.002.130000 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | - | 34,900,000 | - | 34,900,000 |
| 1.01.1.01.0100.002.140000 | Pemeliharaan rutin/berkala mebelair | - | 179,702,500 | - | 179,702,500 |
| 1.01.1.01.0100.002.160000 | Rehabilitasi gedung kantor | - | - | 414,710,000 | 414,710,000 |
| 1.01.1.01.0100.003 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 26,949,000 | 20,412,500 | - | 47,361,500 |
| 1.01.1.01.0100.003.020000 | Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD | 26,949,000 | 20,412,500 | - | 47,361,500 |
| 1.01.1.01.0100.004 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 105,000,000 | 120,222,500 | - | 225,222,500 |
| 1.01.1.01.0100.004.010000 | Pendidikan dan pelatihan formal | 105,000,000 | 101,772,500 | - | 206,772,500 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.01.1.01.0100.004.020000 | Penilaian angka kredit tenaga fungsional SKPD | - | 18,450,000 | - | 18,450,000 |
| 1.01.1.01.0100.005 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 738,515,000 | 118,417,500 | - | 856,932,500 |
| 1.01.1.01.0100.005.010000 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4,375,000 | 23,039,500 | - | 27,414,500 |
| 1.01.1.01.0100.005.020000 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | 1,600,000 | 6,100,000 | - | 7,700,000 |
| 1.01.1.01.0100.005.030000 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 1,920,000 | 8,030,000 | - | 9,950,000 |
| 1.01.1.01.0100.005.040000 | Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ | 730,620,000 | 81,248,000 | - | 811,868,000 |
| 1.01.1.01.0100.006 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 151,490,000 | 4,046,081,600 | 293,808,800 | 4,491,380,400 |
| 1.01.1.01.0100.006.010000 | Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD | 81,505,000 | 2,271,345,000 | 260,458,800 | 2,613,308,800 |
| 1.01.1.01.0100.006.020000 | Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD | 335,000 | 32,144,000 | - | 32,479,000 |
| 1.01.1.01.0100.006.040000 | Pengendalian Internal SKPD | 500,000 | 15,025,000 | - | 15,525,000 |
| 1.01.1.01.0100.006.060000 | Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 69,150,000 | 1,727,567,600 | 33,350,000 | 1,830,067,600 |
| 1.01.1.01.0100.007 | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan | 121,020,000 | 911,679,500 | 244,348,800 | 1,277,048,300 |
| 1.01.1.01.0100.007.010000 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD | 5,835,000 | 76,677,400 | - | 82,512,400 |
| 1.01.1.01.0100.007.020000 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD | 113,660,000 | 620,809,600 | 244,348,800 | 978,818,400 |
| 1.01.1.01.0100.007.030000 | Penyelenggaraan forum SKPD/Forum Gabungan SKPD | 1,525,000 | 44,237,500 | - | 45,762,500 |
| 1.01.1.01.0100.007.040000 | Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD | - | 169,955,000 | - | 169,955,000 |
| 1.01.1.01.0100.015 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 4,700,000 | 2,719,386,900 | 1,495,542,500 | 4,219,629,400 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.01.1.01.0100.015.010000 | Pembangunan gedung PAUD | - | - | 896,790,000 | 896,790,000 |
| 1.01.1.01.0100.015.020000 | Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah PAUD | - | 16,760,000 | - | 16,760,000 |
| 1.01.1.01.0100.015.040000 | Pengadaan sarana prasarana sekolah PAUD | - | 1,130,090,500 | 596,752,500 | 1,726,843,000 |
| 1.01.1.01.0100.015.050000 | Pemeliharaan sarana prasarana sekolah PAUD | - | 16,300,000 | - | 16,300,000 |
| 1.01.1.01.0100.015.060000 | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD | 4,300,000 | 345,550,000 | - | 349,850,000 |
| 1.01.1.01.0100.015.070000 | Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini | 400,000 | 344,554,900 | - | 344,954,900 |
| 1.01.1.01.0100.015.080000 | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | - | 846,438,500 | - | 846,438,500 |
| 1.01.1.01.0100.015.090000 | Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini | - | 15,050,000 | - | 15,050,000 |
| 1.01.1.01.0100.015.110000 | Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini | - | 4,643,000 | 2,000,000 | 6,643,000 |
| 1.01.1.01.0100.016 | Program Pendidikan Dasar SD | 25,795,000 | 3,395,351,950 | 16,961,522,000 | 20,382,668,950 |
| 1.01.1.01.0100.016.010000 | Pembangunan gedung SD/MI (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, jaga dll) | - | 18,650,000 | 4,146,707,000 | 4,165,357,000 |
| 1.01.1.01.0100.016.020000 | Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SD/MI | - | 291,737,500 | - | 291,737,500 |
| 1.01.1.01.0100.016.030000 | Rehabilitasi bangunan sekolah SD/MI | - | - | 3,962,370,000 | 3,962,370,000 |
| 1.01.1.01.0100.016.040000 | Pengadaan sarana prasarana sekolah (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi) | - | 603,444,000 | 8,847,845,000 | 9,451,289,000 |
| 1.01.1.01.0100.016.050000 | Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SD/MI | - | 107,803,000 | - | 107,803,000 |
| 1.01.1.01.0100.016.070000 | Pelatihan Kompetensi Siswa SD/MI Berprestasi | 5,600,000 | 123,865,000 | - | 129,465,000 |
| 1.01.1.01.0100.016.080000 | Pelatihan penyusunan kurikulum SD/MI | - | 22,842,500 | - | 22,842,500 |
| 1.01.1.01.0100.016.100000 | Penyelenggaraan Paket A setara SD | 2,750,000 | 50,137,500 | - | 52,887,500 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.01.1.01.0100.016.110000 | Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SD/MI | 800,000 | 159,390,000 | - | 160,190,000 |
| 1.01.1.01.0100.016.120000 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas | 15,860,000 | 429,085,450 | 4,600,000 | 449,545,450 |
| 1.01.1.01.0100.016.140000 | Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SD/MI | - | 34,371,000 | - | 34,371,000 |
| 1.01.1.01.0100.016.160000 | Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar | - | 25,826,000 | - | 25,826,000 |
| 1.01.1.01.0100.016.170000 | Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMTAS) | 785,000 | 1,528,200,000 | - | 1,528,985,000 |
| 1.01.1.01.0100.017 | Program Pendidikan Dasar SMP | 20,100,000 | 1,205,781,500 | 12,114,713,700 | 13,340,595,200 |
| 1.01.1.01.0100.017.010000 | Pembangunan gedung (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, jaga dll) SMP/MTS | - | - | 6,002,591,700 | 6,002,591,700 |
| 1.01.1.01.0100.017.020000 | Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMP/MTS | - | 155,535,000 | - | 155,535,000 |
| 1.01.1.01.0100.017.030000 | Rehabilitasi bangunan sekolah SMP/MTS | - | - | 2,501,377,500 | 2,501,377,500 |
| 1.01.1.01.0100.017.040000 | Pengadaan sarana prasarana sekolah (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi) SMP/MTS | - | 125,575,000 | 3,607,894,500 | 3,733,469,500 |
| 1.01.1.01.0100.017.050000 | Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SMP/MTS | - | 32,679,000 | - | 32,679,000 |
| 1.01.1.01.0100.017.070000 | Pelatihan Kompetensi Siswa SMP/MTS Berprestasi | 7,700,000 | 60,935,000 | - | 68,635,000 |
| 1.01.1.01.0100.017.080000 | Pelatihan penyusunan kurikulum SMP/MTS | - | 29,015,500 | - | 29,015,500 |
| 1.01.1.01.0100.017.100000 | Penyelenggaraan paket B setara SMP | 12,000,000 | 446,120,000 | - | 458,120,000 |
| 1.01.1.01.0100.017.110000 | Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SMP/MTS | 400,000 | 199,312,000 | - | 199,712,000 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|---------------|-----------|---------------|
| 1.01.1.01.0100.017.120000 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas SMP/MTS | - | 79,617,500 | 2,850,000 | 82,467,500 |
| 1.01.1.01.0100.017.130000 | Pengembangan contactual teaching and learning (CTL) SMP/MTS | - | 18,087,500 | - | 18,087,500 |
| 1.01.1.01.0100.017.140000 | Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SMP/MTS | - | 31,165,000 | - | 31,165,000 |
| 1.01.1.01.0100.017.160000 | Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SMP/MTS | - | 27,740,000 | - | 27,740,000 |
| 1.01.1.01.0100.018 | Program Pendidikan Menengah | 232,050,000 | 2,438,304,600 | - | 2,670,354,600 |
| 1.01.1.01.0100.018.020000 | Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMA/SMK | - | 34,600,000 | - | 34,600,000 |
| 1.01.1.01.0100.018.050000 | Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SMA/SMK | - | 2,920,000 | - | 2,920,000 |
| 1.01.1.01.0100.018.070000 | Pelatihan Kompetensi Siswa SMA/SMK Berprestasi | 16,300,000 | 155,585,000 | - | 171,885,000 |
| 1.01.1.01.0100.018.080000 | Pelatihan penyusunan kurikulum SMA/SMK | - | 39,610,000 | - | 39,610,000 |
| 1.01.1.01.0100.018.100000 | Penyelenggaraan paket C setara SMA | 19,500,000 | 1,069,620,000 | - | 1,089,120,000 |
| 1.01.1.01.0100.018.110000 | Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) SMA/SMK | 83,000,000 | 827,532,000 | - | 910,532,000 |
| 1.01.1.01.0100.018.120000 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas SMA/SMK | 113,250,000 | 267,105,100 | - | 380,355,100 |
| 1.01.1.01.0100.018.140000 | Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SMA/SMK | - | 34,037,500 | - | 34,037,500 |
| 1.01.1.01.0100.018.160000 | Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SMA/SMK | - | 7,295,000 | - | 7,295,000 |
| 1.01.1.01.0100.019 | Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga | 10,000,000 | 271,594,600 | - | 281,594,600 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|------------|---------------|-------------|---------------|
| | Kependidikan Tingkat SD | | | | |
| 1.01.1.01.0100.019.040000 | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SD/MI | - | 170,062,000 | - | 170,062,000 |
| 1.01.1.01.0100.019.070000 | Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) | - | 40,180,100 | - | 40,180,100 |
| 1.01.1.01.0100.019.080000 | Pelatihan penilaian kinerja guru/Kepala Sekolah SD/MI | - | 26,787,500 | - | 26,787,500 |
| 1.01.1.01.0100.019.110000 | Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidikan SD/MI | 10,000,000 | 34,565,000 | - | 44,565,000 |
| 1.01.1.01.0100.020 | Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMP | 10,000,000 | 149,173,000 | - | 159,173,000 |
| 1.01.1.01.0100.020.040000 | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SMP/MTS | - | 70,125,000 | - | 70,125,000 |
| 1.01.1.01.0100.020.060000 | Pelatihan penilaian kinerja guru/Kepala Sekolah SMP/MTS | - | 11,240,500 | - | 11,240,500 |
| 1.01.1.01.0100.020.090000 | Pembinaan Kelompok Kerja Guru MGMP SMP/MTS | - | 43,887,500 | - | 43,887,500 |
| 1.01.1.01.0100.020.110000 | Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidikan SMP/MTs | 10,000,000 | 23,920,000 | - | 33,920,000 |
| 1.01.1.01.0100.021 | Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Tingkat Menengah | 10,000,000 | 172,960,000 | - | 182,960,000 |
| 1.01.1.01.0100.021.040000 | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik menengah | - | 50,985,000 | - | 50,985,000 |
| 1.01.1.01.0100.021.090000 | Pembinaan Kelompok Kerja Guru MGMP sekolah menengah | - | 101,250,000 | - | 101,250,000 |
| 1.01.1.01.0100.021.110000 | Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidikan menengah | 10,000,000 | 20,725,000 | - | 30,725,000 |
| 1.01.1.01.0100.022 | Program Pendidikan Non Formal | 28,575,000 | 3,434,430,500 | 120,700,000 | 3,583,705,500 |
| 1.01.1.01.0100.022.010000 | Pemberdayaan tenaga pendidik non formal | - | 15,525,000 | - | 15,525,000 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1.01.1.01.0100.022.020000 | Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal | 3,300,000 | 41,845,000 | - | 45,145,000 |
| 1.01.1.01.0100.022.030000 | Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan | 10,500,000 | 178,975,000 | - | 189,475,000 |
| 1.01.1.01.0100.022.040000 | Pengembangan pendidikan keaksaraan | 13,975,000 | 2,946,470,000 | - | 2,960,445,000 |
| 1.01.1.01.0100.022.050000 | Pengembangan pendidikan kecakapan hidup | 800,000 | 199,985,000 | 113,590,000 | 314,375,000 |
| 1.01.1.01.0100.022.060000 | Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal | - | 6,500,000 | 7,110,000 | 13,610,000 |
| 1.01.1.01.0100.022.070000 | Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal | - | 29,158,000 | - | 29,158,000 |
| 1.01.1.01.0100.022.080000 | Pengembangan kebijakan pendidikan non formal | - | 5,225,000 | - | 5,225,000 |
| 1.01.1.01.0100.022.090000 | Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal | - | 10,747,500 | - | 10,747,500 |
| 1.01.1.01.0100.023 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 524,487,000 | 4,417,445,500 | 311,750,000 | 5,253,682,500 |
| 1.01.1.01.0100.023.010000 | Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan | 402,152,000 | 2,553,588,000 | - | 2,955,740,000 |
| 1.01.1.01.0100.023.020000 | Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan | 200,000 | 43,680,000 | - | 43,880,000 |
| 1.01.1.01.0100.023.030000 | Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi | 80,210,000 | 1,406,467,500 | 311,750,000 | 1,798,427,500 |
| 1.01.1.01.0100.023.050000 | Pembinaan Dewan Pendidikan | - | 69,202,500 | - | 69,202,500 |
| 1.01.1.01.0100.023.060000 | Pembinaan Komite Sekolah | - | 137,680,000 | - | 137,680,000 |
| 1.01.1.01.0100.023.070000 | Penerapan sistem dan informasi majamenen pendidikan | 40,725,000 | 71,640,000 | - | 112,365,000 |
| 1.01.1.01.0100.023.080000 | Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan | 1,200,000 | 135,187,500 | - | 136,387,500 |
| 1.18.1.01.0100.015 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 1,050,000 | 2,169,301,500 | 6,600,000 | 2,176,951,500 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|---------------|-----------|---------------|
| 1.18.1.01.0100.015.010000 | Pembinaan organisasi kepemudaan | - | 154,604,000 | 600,000 | 155,204,000 |
| 1.18.1.01.0100.015.020000 | Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan | - | 94,927,500 | - | 94,927,500 |
| 1.18.1.01.0100.015.030000 | Pendampingan pekan temu wicara organisasi pemuda | - | 73,350,000 | - | 73,350,000 |
| 1.18.1.01.0100.015.040000 | Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda | - | 852,520,000 | - | 852,520,000 |
| 1.18.1.01.0100.015.050000 | Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan | - | 111,305,000 | - | 111,305,000 |
| 1.18.1.01.0100.015.060000 | Peningkatan Keimanan dan ketaqwaan pemuda | 500,000 | 194,617,500 | 6,000,000 | 201,117,500 |
| 1.18.1.01.0100.015.070000 | Pembentukan Paskibraka | 550,000 | 687,977,500 | - | 688,527,500 |
| 1.18.1.01.0100.016 | Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | 4,500,000 | 359,250,000 | - | 363,750,000 |
| 1.18.1.01.0100.016.010000 | Pelatihan kewirausahaan | 4,500,000 | 359,250,000 | - | 363,750,000 |
| 1.18.1.01.0100.017 | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | 124,030,000 | 4,660,952,500 | 3,200,000 | 4,788,182,500 |
| 1.18.1.01.0100.017.010000 | Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat | 122,380,000 | 679,287,500 | - | 801,667,500 |
| 1.18.1.01.0100.017.020000 | Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Daerah | 700,000 | 428,342,500 | - | 429,042,500 |
| 1.18.1.01.0100.017.030000 | Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi | 200,000 | 1,949,035,000 | 3,200,000 | 1,952,435,000 |
| 1.18.1.01.0100.017.040000 | Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga | 750,000 | 1,363,327,500 | - | 1,364,077,500 |
| 1.18.1.01.0100.017.050000 | Pengembangan Olahraga Rekreasi | - | 240,960,000 | - | 240,960,000 |
| 1.18.1.01.0100.018 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | - | 6,000,000 | - | 6,000,000 |
| 1.18.1.01.0100.018.010000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga | - | 6,000,000 | - | 6,000,000 |

Data Hasil Scraping dan Cleaning

| | | | |
|---------------------------|---|----------------|-------------------|
| Judul | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | | |
| Daerah | Provinsi | | |
| Tahun | 2014 | | |
| Kode Organisasi | 10601 | | |
| Nama Organisasi | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| Kolom | 4 | | |
| No Rekening | Uraian | Jumlah | Keterangan |
| 1.06.1.06.00.00.4. | Pendapatan | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 1.06.1.06.00.00.5. | Belanja | 23904871616.00 | |
| 1.06.1.06.00.00.5.1. | Belanja Tidak Langsung | 6033969656.00 | |
| 1.06.1.06.00.00.5.1.1. | Belanja Pegawai | 6033969656.00 | |
| 1.06.1.06.00.00.5.1.1.01. | Gaji Dan Tunjangan | 6033969656.00 | |
| 1.06.1.06.00.00.5.2. | BELANJA LANGSUNG | 17870901960.00 | |
| 1.06.1.06.01.01. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1523229600.00 | |
| 1.06.1.06.01.02. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR | 2948116725.00 | |
| 1.06.1.06.01.05. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR | 346064000.00 | |
| 1.06.1.06.01.06. | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PALAPORAN CAPAIAN KIBERJA KEUANGAN | 128600575.00 | |
| 1.06.1.06.01.15. | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI | 334742110.00 | |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|--|
| 1.06.1.06.01.15.029. | Pengembangan Sistem Informasi Profile Daerah | 107870000.00 | |
| 1.06.1.06.01.15.033. | Ekspose Perencanaan Pembangunan Daerah | 49551500.00 | |
| 1.06.1.06.01.15.034. | Pengembangan Sistem Jaringan Internet | 153986110.00 | |
| 1.06.1.06.01.15.035. | Pengelolaan Website | 23334500.00 | |
| 1.06.1.06.01.21. | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1657488500.00 | |
| 1.06.1.06.01.21.008. | Penyusunan Rancangan RKPD | 659255000.00 | |
| 1.06.1.06.01.21.030. | Penyusunan KUA DAN PPAS | 203005000.00 | |
| 1.06.1.06.01.21.031. | Penyusunan KUA DAN PPAS Perubahan | 157615000.00 | |
| 1.06.1.06.01.21.033. | Sinkronisasi Dan Koordinasi Program Pembangunan | 326867500.00 | |
| 1.06.1.06.01.21.068. | Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan | 182102000.00 | |
| 1.06.1.06.01.21.069. | Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 128644000.00 | |
| 1.06.1.06.01.22. | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI | 1084225500.00 | |
| 1.06.1.06.01.22.059. | Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan | 379984000.00 | |
| 1.06.1.06.01.22.060. | Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha | 323042000.00 | |
| 1.06.1.06.01.22.061. | Koordinasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan | 175939000.00 | |
| 1.06.1.06.01.22.062. | Koordinasi Sub Bidang Usaha Dunia Usaha | 147715000.00 | |
| 1.06.1.06.01.22.064. | Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) | 57545500.00 | |
| 1.06.1.06.01.23. | PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA | 1423702700.00 | |
| 1.06.1.06.01.23.015. | Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan | 299999350.00 | |
| 1.06.1.06.01.23.041. | Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM | 350000000.00 | |
| 1.06.1.06.01.23.042. | Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra | 399997000.00 | |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|--|
| 1.06.1.06.01.23.043. | Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pengembangan SDM | 148710000.00 | |
| 1.06.1.06.01.23.044. | Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pengembangan Kesra | 149999150.00 | |
| 1.06.1.06.01.23.046. | Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGs | 74997200.00 | |
| 1.06.1.06.01.26. | PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA | 1830253000.00 | |
| 1.06.1.06.01.26.001. | Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM | 599870000.00 | |
| 1.06.1.06.01.26.002. | Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | 450000000.00 | |
| 1.06.1.06.01.26.003. | Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan ESDM | 174995000.00 | |
| 1.06.1.06.01.26.004. | Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | 120000000.00 | |
| 1.06.1.06.01.26.007. | Pembinaan Penataan Ruang Daerah | 200000000.00 | |
| 1.06.1.06.01.26.008. | Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan | 195388000.00 | |
| 1.06.1.06.01.26.009. | Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD | 90000000.00 | |
| 1.06.1.06.01.27. | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN | 1224531950.00 | |
| 1.06.1.06.01.27.001. | Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik | 363375000.00 | |
| 1.06.1.06.01.27.002. | Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan | 329477100.00 | |
| 1.06.1.06.01.27.003. | Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik | 125000000.00 | |
| 1.06.1.06.01.27.004. | Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan | 157019600.00 | |
| 1.06.1.06.01.27.005. | Fasilitasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia dan Laboratorium Ketahanan Nasional (labkurtannas) di Provinsi DIY | 95082000.00 | |

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--|
| 1.06.1.06.01.27.007. | Fasilitasi Pemberantasan Korupsi | 83761250.00 | |
| 1.06.1.06.01.27.008. | Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah | 70817000.00 | |
| 1.06.1.06.01.28. | PROGRAM PENYUSUNAN PEMBANGUNAN DAERAH | 3184433300.00 | |
| 1.06.1.06.01.28.001. | Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 150000000.00 | |
| 1.06.1.06.01.28.002. | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | 299995000.00 | |
| 1.06.1.06.01.28.003. | Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah | 216155500.00 | |
| 1.06.1.06.01.28.004. | Fasilitasi Pengadaan Barang Dan Jasa | 59800000.00 | |
| 1.06.1.06.01.28.005. | Pengendalian dan Koordinasi Program Strategis di DIY | 141067000.00 | |
| 1.06.1.06.01.28.007. | Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah | 74999975.00 | |
| 1.06.1.06.01.28.008. | Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota | 124999925.00 | |
| 1.06.1.06.01.28.010. | Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kepada Kabupaten/Kota Dan Masyarakat | 45775000.00 | |
| 1.06.1.06.01.28.011. | Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Lingkup Pemda DIY dan Kabupaten/Kota | 51603000.00 | |
| 1.06.1.06.01.28.012. | Monitoring dan Evaluasi Pengentasan Kemiskinan | 118639000.00 | |
| 1.06.1.06.01.28.013. | Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan | 490550000.00 | |
| 1.06.1.06.01.28.014. | Pengembangan Aplikasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 490550000.00 | |
| 1.23.1.06.01.16. | PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH | 2185514000.00 | |
| 1.23.1.06.01.16.001. | Pengeolahan, Analisis, Monitoring, Dan Evaluasi Data Statistik Daerah | 1714546000.00 | |
| 1.23.1.06.01.16.003. | Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah | 470968000.00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 23904871616.00 | |

URUSAN : 1 - WAJIB

MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

UNIT ORGANISASI : 1.20.21 KECAMATAN KRATON

Halaman : 1056

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.00 | PENDAPATAN DAERAH | 13,562,000 | |
| 1.20.1.20.21.00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 13,562,000 | |
| 1.20.1.20.21.000.000.4.1.2 | HASIL RETRIBUSI DAERAH | 13,562,000 | |
| 1.20.1.20.21.000.000.4.1.2.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 13,562,000 | |
| 1.20.1.20.21.000.000.4.1.2.03.06 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan | 402,000 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 402,000 |
| 1.20.1.20.21.000.000.4.1.2.03.07 | Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan | 13,160,000 | Retribusi Izin Gangguan Dari Kecamatan Perda No 3 Tahun 2012 13,160,000 |
| 1.20.1.20.21.000.000.5 | BELANJA DAERAH | 5,474,516,415 | |
| 1.20.1.20.21.00 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2,404,072,449 | |
| 1.20.1.20.21.000.000.5.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 2,404,072,449 | |
| 1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01 | Belanja Gaji Dan Tunjangan | 2,403,394,349 | Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,403,394,349 |
| 1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) | 1,803,406,223 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,803,406,223 |
| 1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga (DAU) | 171,636,375 | Tunjangan Keluarga (DAU) 171,636,375 |
| 1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) | 205,922,500 | Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 205,922,500 |
| 1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum (DAU) | 23,226,500 | Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 23,226,500 |
| 1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras (DAU) | 92,608,112 | Tunjangan Beras (DAU) 92,608,112 |
| 1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) | 55,321,172 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 55,321,172 |
| 1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji (DAU) | 22,973 | Pembulatan Gaji (DAU) 22,973 |
| 1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.01.09 | Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) | 51,250,494 | Iuran Asuransi Kesehatan/BPJS Kesehatan (DAU) 51,250,494 |
| 1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.06 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 678,100 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 678,100 |
| 1.20.1.20.21.000.000.5.1.1.06.01 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 678,100 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 678,100 |
| 1.20.1.20.21.000.000 | BELANJA LANGSUNG | 3,070,443,966 | |
| 1.20.1.20.21.001 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 753,721,100 | |
| 1.20.1.20.21.001.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4,530,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.001.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 4,530,000 | |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|--|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.001.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4,530,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.001.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos | 4,530,000 | Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 4,530,000 |
| 1.20.1.20.21.001.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 81,000,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.002.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 81,000,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 81,000,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.002.5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 21,000,000 | Belanja Telepon 21,000,000 |
| 1.20.1.20.21.001.002.5.2.2.03.02 | Belanja Air | 7,200,000 | Belanja Air 7,200,000 |
| 1.20.1.20.21.001.002.5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 52,800,000 | Belanja Listrik 52,800,000 |
| 1.20.1.20.21.001.003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 168,675,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.003.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 148,750,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.003.5.2.1.06 | Uang Piket | 148,750,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.003.5.2.1.06.02 | Uang Piket Non PNS | 148,750,000 | Uang Piket Non PNS 148,750,000 |
| 1.20.1.20.21.001.003.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 19,925,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 9,675,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.01.07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 9,675,000 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 9,675,000 |
| 1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 4,800,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 300,000 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 300,000 |
| 1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.07.03 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 4,500,000 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 4,500,000 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5,450,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1,050,000 | Belanja Sewa Meja Kursi 1,050,000 |
| 1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 800,000 | Belanja Sewa Tenda 800,000 |
| 1.20.1.20.21.001.003.5.2.2.10.09 | Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan | 3,600,000 | Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 3,600,000 |
| 1.20.1.20.21.001.006 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 4,050,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.006.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 4,050,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.006.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 4,050,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.006.5.2.2.05.05 | Belanja STNK | 4,050,000 | Belanja STNK 4,050,000 |
| 1.20.1.20.21.001.007 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 69,300,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.007.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 69,300,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.007.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 69,300,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.007.5.2.1.01.04 | Honorarium Pengelola Keuangan/Barang | 69,300,000 | Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 69,300,000 |
| 1.20.1.20.21.001.008 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 11,181,200 | |
| 1.20.1.20.21.001.008.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 11,181,200 | |
| 1.20.1.20.21.001.008.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7,533,200 | |
| 1.20.1.20.21.001.008.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 7,533,200 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 7,533,200 |
| 1.20.1.20.21.001.008.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3,648,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.008.5.2.2.03.14 | Belanja Retribusi/Tiket | 3,648,000 | Belanja Retribusi/Tiket 3,648,000 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.001.009 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 9,600,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.009.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 9,600,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.009.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 9,600,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.009.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio | 9,600,000 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 9,600,000 |
| 1.20.1.20.21.001.010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 20,018,500 | |
| 1.20.1.20.21.001.010.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 20,018,500 | |
| 1.20.1.20.21.001.010.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 20,018,500 | |
| 1.20.1.20.21.001.010.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 20,018,500 | Belanja Alat Tulis Kantor 20,018,500 |
| 1.20.1.20.21.001.011 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 21,750,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.011.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 21,750,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.011.5.2.2.06 | Belanja Cetak Dan Penggandaan | 21,750,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.011.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 21,750,000 | Belanja Penggandaan 21,750,000 |
| 1.20.1.20.21.001.012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5,413,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.012.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 5,413,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.012.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5,413,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.012.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik | 5,413,000 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 5,413,000 |
| 1.20.1.20.21.001.013 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7,975,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.013.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 7,975,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.013.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 580,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.013.5.2.2.02.06 | Belanja Bahan Komputer/Printer | 580,000 | Belanja Bahan Komputer/Printer 580,000 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.001.013.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 7,395,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.013.5.2.2.20.11 | Belanja Pemeliharaan Komputer | 7,395,000 | Belanja Pemeliharaan Komputer 7,395,000 |
| 1.20.1.20.21.001.014 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 16,440,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.014.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 16,440,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.014.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 963,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.014.5.2.2.02.07 | Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja | 963,000 | Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 963,000 |
| 1.20.1.20.21.001.014.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 15,477,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.014.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio | 13,250,000 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 13,250,000 |
| 1.20.1.20.21.001.014.5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Taman | 2,227,000 | Belanja Pemeliharaan Taman 2,227,000 |
| 1.20.1.20.21.001.015 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5,400,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.015.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 3,900,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.015.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 3,900,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.015.5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 3,900,000 | Belanja Surat Kabar/Majalah 3,900,000 |
| 1.20.1.20.21.001.015.5.2.3 | BELANJA MODAL | 1,500,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.015.5.2.3.27 | Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan | 1,500,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.015.5.2.3.27.16 | Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | 500,000 | Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 500,000 |
| 1.20.1.20.21.001.015.5.2.3.27.21 | Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan | 1,000,000 | Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan 1,000,000 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|--|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.001.017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 124,294,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.017.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 124,294,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.017.5.2.2.11 | Belanja Makanan Dan Minuman | 124,294,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.017.5.2.2.11.01 | Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai | 27,104,000 | Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 27,104,000 |
| 1.20.1.20.21.001.017.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 82,270,000 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 82,270,000 |
| 1.20.1.20.21.001.017.5.2.2.11.05 | Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring | 8,100,000 | Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 8,100,000 |
| 1.20.1.20.21.001.017.5.2.2.11.07 | Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum | 6,820,000 | Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 6,820,000 |
| 1.20.1.20.21.001.018 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 78,380,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.018.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 78,380,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.018.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 78,380,000 | |
| 1.20.1.20.21.001.018.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10,880,000 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,880,000 |
| 1.20.1.20.21.001.018.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 67,500,000 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 67,500,000 |
| 1.20.1.20.21.001.019 | Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan | 125,714,400 | |
| 1.20.1.20.21.001.019.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 125,714,400 | |
| 1.20.1.20.21.001.019.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 125,714,400 | |
| 1.20.1.20.21.001.019.5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 125,714,400 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 125,714,400 |
| 1.20.1.20.21.002 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 130,690,000 | |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.002.021 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 15,500,000 | |
| 1.20.1.20.21.002.021.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 15,500,000 | |
| 1.20.1.20.21.002.021.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 500,000 | |
| 1.20.1.20.21.002.021.5.2.2.03.22 | Belanja PBB | 500,000 | Belanja PBB 500,000 |
| 1.20.1.20.21.002.021.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 15,000,000 | |
| 1.20.1.20.21.002.021.5.2.2.20.03 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah | 15,000,000 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 15,000,000 |
| 1.20.1.20.21.002.022 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 35,500,000 | |
| 1.20.1.20.21.002.022.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 35,500,000 | |
| 1.20.1.20.21.002.022.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 35,500,000 | |
| 1.20.1.20.21.002.022.5.2.2.20.03 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah | 35,500,000 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 35,500,000 |
| 1.20.1.20.21.002.024 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 79,690,000 | |
| 1.20.1.20.21.002.024.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 79,690,000 | |
| 1.20.1.20.21.002.024.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 79,690,000 | |
| 1.20.1.20.21.002.024.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 4,120,000 | Belanja Jasa Service 4,120,000 |
| 1.20.1.20.21.002.024.5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 14,910,000 | Belanja Penggantian Suku Cadang 14,910,000 |
| 1.20.1.20.21.002.024.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 60,660,000 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 60,660,000 |
| 1.20.1.20.21.005 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4,933,000 | |
| 1.20.1.20.21.005.001 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 4,933,000 | |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|---|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.005.001.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 4,933,000 | |
| 1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak Dan Penggandaan | 69,000 | |
| 1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.06.03 | Belanja Cetak Foto | 69,000 | Belanja Cetak Foto 69 000 |
| 1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan Dan Minuman | 1,664,000 | |
| 1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1,664,000 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,664,000 |
| 1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator | 3,200,000 | |
| 1.20.1.20.21.005.001.5.2.2.31.03 | Belanja Jasa Narasumber | 3,200,000 | Belanja Jasa Narasumber 3,200,000 |
| 1.20.1.20.21.006 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 33,511,000 | |
| 1.20.1.20.21.006.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 33,511,000 | |
| 1.20.1.20.21.006.001.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 7,740,000 | |
| 1.20.1.20.21.006.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7,740,000 | |
| 1.20.1.20.21.006.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 7,740,000 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,740,000 |
| 1.20.1.20.21.006.001.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 25,771,000 | |
| 1.20.1.20.21.006.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak Dan Penggandaan | 12,675,000 | |
| 1.20.1.20.21.006.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 12,675,000 | Belanja Penggandaan 12,675,000 |
| 1.20.1.20.21.006.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan Dan Minuman | 13,096,000 | |
| 1.20.1.20.21.006.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13,096,000 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13,096,000 |
| 1.20.1.20.21.124 | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton | 482,920,700 | |
| 1.20.1.20.21.124.001 | Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 180,938,750 | |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|--|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 43,897,500 | |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 39,982,500 | |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 39,982,500 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39,982,500 |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 3,915,000 | |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.1.02.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3,915,000 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,915,000 |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 137,041,250 | |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8,330,000 | |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 8,330,000 | Belanja Alat Tulis Kantor 8,330,000 |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 1,050,000 | |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.03.13 | Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film | 1,050,000 | Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 1,050,000 |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak Dan Penggandaan | 8,673,250 | |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 8,080,750 | Belanja Penggandaan 8,080,750 |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.06.03 | Belanja Cetak Foto | 592,500 | Belanja Cetak Foto 592,500 |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2,834,000 | |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1,634,000 | Belanja Sewa Meja Kursi 1,634,000 |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 1,200,000 | Belanja Sewa Tenda 1,200,000 |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan Dan Minuman | 64,304,000 | |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 56,564,000 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 56,564,000 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|--|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.11.05 | Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring | 7,740,000 | Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 7,740 000 |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 29,500,000 | |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 29,500,000 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29,500 000 |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator | 22,350,000 | |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.31.03 | Belanja Jasa Narasumber | 20,400,000 | Belanja Jasa Narasumber 20,400 000 |
| 1.20.1.20.21.124.001.5.2.2.31.04 | Belanja Jasa Moderator | 1,950,000 | Belanja Jasa Moderator 1,950 000 |
| 1.20.1.20.21.124.002 | Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan | 147,586,200 | |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 29,188,500 | |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 29,188,500 | |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 28,813,500 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28,813 500 |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 375,000 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 375 000 |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 118,397,700 | |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2,947,600 | |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2,947,600 | Belanja Alat Tulis Kantor 2,947 600 |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 72,473,100 | |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.03.13 | Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film | 2,940,000 | Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,940 000 |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.03.27 | Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis | 69,533 100 | Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 69,533,100 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|--|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak Dan Penggandaan | 5,847,000 | |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 3,000,000 | Belanja Cetak 3,000,000 |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2,817,000 | Belanja Penggandaan 2,817,000 |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.06.03 | Belanja Cetak Foto | 30,000 | Belanja Cetak Foto 30,000 |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2,400,000 | |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 900,000 | Belanja Sewa Meja Kursi 900,000 |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.10.09 | Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan | 1,500,000 | Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1,500,000 |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan Dan Minuman | 23,480,000 | |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 13,112,000 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13,112,000 |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.11.05 | Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring | 10,368,000 | Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 10,368,000 |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6,000,000 | |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 6,000,000 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,000,000 |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator | 5,250,000 | |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.31.03 | Belanja Jasa Narasumber | 4,800,000 | Belanja Jasa Narasumber 4,800,000 |
| 1.20.1.20.21.124.002.5.2.2.31.04 | Belanja Jasa Moderator | 450,000 | Belanja Jasa Moderator 450,000 |
| 1.20.1.20.21.124.003 | Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban | 154,395,750 | |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 94,363,500 | |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 54,958,500 | |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 54,958,500 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54,958,500 |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.1.06 | Uang Piket | 39,905,000 | |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.1.06.01 | Uang Piket PNS | 6,000,000 | Uang Piket PNS 6,000,000 |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.1.06.02 | Uang Piket Non PNS | 33,905,000 | Uang Piket Non PNS 33,905,000 |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 59,182,250 | |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 4,855,000 | |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 4,680,000 | Belanja Bahan Baku Bangunan 4,680,000 |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.02.07 | Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja | 175,000 | Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 175,000 |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak Dan Penggandaan | 493,750 | |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 493,750 | Belanja Penggandaan 493,750 |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan Dan Minuman | 39,693,000 | |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 15,992,000 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15,992,000 |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.11.05 | Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring | 23,706,000 | Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 23,706,000 |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 8,930,500 | |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 8,930,500 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,930,500 |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator | 5,200,000 | |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.31.03 | Belanja Jasa Narasumber | 4,600,000 | Belanja Jasa Narasumber 4,600,000 |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.2.31.04 | Belanja Jasa Moderator | 600,000 | Belanja Jasa Moderator 600,000 |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.3 | BELANJA MODAL | 350,000 | |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.3.11 | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 350,000 | |
| 1.20.1.20.21.124.003.5.2.3.11.14 | Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat | 350,000 | Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 350,000 |
| 1.20.1.20.21.125 | Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton | 1,664,668,166 | |
| 1.20.1.20.21.125.001 | Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton | 795,177,220 | |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 50,659,500 | |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 36,359,500 | |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 36,359,500 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36,359,500 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 14,300,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.1.02.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 14,300,000 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,300,000 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 744,517,720 | |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 40,192,500 | |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 40,192,500 | Belanja Alat Tulis Kantor 40,192,500 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 8,920,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.02.08 | Belanja Hadiah/Trophy | 4,920,000 | Belanja Hadiah/Trophy 4,920,000 |
| | | | Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga 3,420,000 |
| | | | Lomba Bayi Sehat 1,500,000 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.02.09 | Belanja Bahan Percontohan | 4,000,000 | Belanja Bahan Percontohan 4,000,000 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|--|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Pembinaan Toga 1,000,000 |
| | | | Pelatihan Boga untuk korban KDRT 3,000,000 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 7,795,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.03.13 | Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film | 7,795,000 | Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 7,795,000 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.06 | Belanja Cetak Dan Penggandaan | 27,767,100 | |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 100,000 | Belanja Cetak 100,000 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 27,127,100 | Belanja Penggandaan 27,127,100 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.06.03 | Belanja Cetak Foto | 540,000 | Belanja Cetak Foto 540,000 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 5,700,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 5,700,000 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5,700,000 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 60,510,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 6,160,000 | Belanja Sewa Meja Kursi 6,160,000 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 3,750,000 | Belanja Sewa Generator 3,750,000 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 4,800,000 | Belanja Sewa Tenda 4,800,000 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.10.09 | Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan | 45,800,000 | Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 45,800,000 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.11 | Belanja Makanan Dan Minuman | 369,078,120 | |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 355,038,120 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 355,038,120 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|--|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.11.05 | Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring | 14,040,000 | Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 14,040,000 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 142,555,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 142,555,000 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 142,555,000 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator | 82,000,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.31.02 | Belanja Jasa Instruktur | 13,900,000 | Belanja Jasa Instruktur 13,900,000 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.31.03 | Belanja Jasa Narasumber | 61,400,000 | Belanja Jasa Narasumber 61,400,000 |
| 1.20.1.20.21.125.001.5.2.2.31.04 | Belanja Jasa Moderator | 6,700,000 | Belanja Jasa Moderator 6,700,000 |
| 1.20.1.20.21.125.002 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan | 121,343,350 | |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 6,510,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2,250,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2,250,000 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,250,000 |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 4,260,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 4,260,000 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4,260,000 |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 114,833,350 | |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 300,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 300,000 | Belanja Alat Tulis Kantor 300,000 |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 4,905,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 3,300,000 | Belanja Bahan Obat-Obatan 3,300,000 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.02.09 | Belanja Bahan Percontohan | 1,605,030 | Belanja Bahan Percontohan 1,605 000 Pelatihan Ngadisariro dan Ngudibusono 290,000 Pelatihan membuat es krim 810,000 Pelatihan pengarakagaman aneka ikan 505,000 |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.06 | Belanja Cetak Dan Penggandaan | 1,996,350 | |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1,996,350 | Belanja Penggandaan 1,996 350 |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3,054,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 204,000 | Belanja Sewa Meja Kursi 204 000 |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.10.09 | Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan | 2,850,000 | Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 2,850 000 |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.11 | Belanja Makanan Dan Minuman | 51,528,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 51,528,000 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 51,528 000 |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 34,000,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 34,000,000 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34,000 000 |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator | 19,050,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.31.01 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 2,700,030 | Belanja Jasa Tenaga Ahli 2,700 000 |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.31.02 | Belanja Jasa Instruktur | 5,000,030 | Belanja Jasa Instruktur 5,000 000 |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.31.03 | Belanja Jasa Narasumber | 11,200,030 | Belanja Jasa Narasumber 11,200 000 |
| 1.20.1.20.21.125.002.5.2.2.31.04 | Belanja Jasa Moderator | 150,030 | Belanja Jasa Moderator 150 000 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|--|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.125.003 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan | 176,557,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 7,590,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4,550,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4,550,000 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,550,000 |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 3,040,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.1.02.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3,040,000 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,040,000 |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 168,967,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6,700,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6,700,000 | Belanja Alat Tulis Kantor 6,700,000 |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 9,375,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.02.09 | Belanja Bahan Percontohan | 9,375,000 | Belanja Bahan Percontohan 9,375,000 |
| | | | Memasak Aneka Pepes Ikan 1,875,300 |
| | | | Memasak Aneka Kue Basah 1,875,300 |
| | | | Membuat Hantaran 2,500,300 |
| | | | Membarik 3,125,300 |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2,015,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.03.13 | Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film | 2,015,000 | Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,015,000 |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.06 | Belanja Cetak Dan Penggandaan | 3,054,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2,086,500 | Belanja Penggandaan 2,086,500 |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.06.03 | Belanja Cetak Foto | 967,500 | Belanja Cetak Foto 967,500 |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3,600,000 | |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|---|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 3,600,000 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3,600,000 |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4,800,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.10.02 | Belanja Sewa Komputer Dan Printer | 4,800,000 | Belanja Sewa Komputer Dan Printer 4,800,000 |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.11 | Belanja Makanan Dan Minuman | 51,648,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 51,648,000 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 51,648,000 |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 25,375,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 25,375,000 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25,375,000 |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator | 62,400,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.31.02 | Belanja Jasa Instruktur | 17,400,000 | Belanja Jasa Instruktur 17,400,000 |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.31.03 | Belanja Jasa Narasumber | 40,800,000 | Belanja Jasa Narasumber 40,800,000 |
| 1.20.1.20.21.125.003.5.2.2.31.04 | Belanja Jasa Moderator | 4,200,000 | Belanja Jasa Moderator 4,200,000 |
| 1.20.1.20.21.125.004 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten | 118,933,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 4,475,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2,955,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2,955,000 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,955,000 |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1,520,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | 1,520,000 | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap 1,520,000 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|--|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 114,458,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3,500,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3,500,000 | Belanja Alat Tulis Kantor 3,500,000 |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 18,600,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.02.09 | Belanja Bahan Percontohan | 18,600,000 | Belanja Bahan Percontohan 18,600,000 |
| | | | Pembuatan mainan anak 4,500,000 |
| | | | Pelatihan berbusana jawa 1,350,000 |
| | | | Pelatihan tata kecantikan wajah dan rambut 4,500,000 |
| | | | Pelatihan pembuatan blangkon 3,750,000 |
| | | | Pembuatan kue tradisional 4,500,000 |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 2,250,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.03.13 | Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film | 2,250,000 | Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2,250,000 |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.06 | Belanja Cetak Dan Penggandaan | 2,192,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 110,000 | Belanja Cetak 110,000 |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 1,515,000 | Belanja Penggandaan 1,515,000 |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.06.03 | Belanja Cetak Foto | 567,000 | Belanja Cetak Foto 567,000 |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 19,140,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1,160,000 | Belanja Sewa Meja Kursi 1,160,000 |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator | 2,700,000 | Belanja Sewa Generator 2,700,000 |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | 2,700,000 | Belanja Sewa Tenda 2,700,000 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|---|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | 8,500,000 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 8,500,000 |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.10.09 | Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan | 4,080,000 | Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 4,080,000 |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.11 | Belanja Makanan Dan Minuman | 35,526,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 35,526,000 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 35,526,000 |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 17,250,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 17,250,000 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17,250,000 |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator | 16,000,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.004.5.2.2.31.02 | Belanja Jasa Instruktur | 16,000,000 | Belanja Jasa Instruktur 16,000,000 |
| 1.20.1.20.21.125.005 | Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton | 452,657,596 | |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 5,850,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.1.01 | Honorarium PNS | 5,850,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2,550,000 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,550,000 |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 3,300,000 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,300,000 |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 446,807,596 | |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 225,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.03.13 | Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film | 225,000 | Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 225,000 |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.06 | Belanja Cetak Dan Penggandaan | 597,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 597,000 | Belanja Penggandaan 597,000 |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | PENJELASAN |
|----------------------------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.11 | Belanja Makanan Dan Minuman | 7,860,000 | |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1,920,000 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,920,000 |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.11.05 | Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring | 5,940,000 | Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 5,940,000 |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 413,896,600 | |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 285,896,600 | Belanja Pemeliharaan Jalan 285,896,600 |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.20.08 | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum | 117,920,000 | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 117,920,000 |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.20.13 | Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum | 10,080,000 | Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 10,080,000 |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultansi | 24,228,996 | |
| 1.20.1.20.21.125.005.5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 24,228,996 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 24,228,996 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 13,562,000 | |
| JUMLAH BELANJA | | 5,474,516,415 | |
| SURPLUS/(DEFISIT) | | (5,460,954,415) | |

MEWUJUDKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI SARANA PENGUATAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN

Nuning Suryatiningsih

Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup tiap-tiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia serta merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat tanpa pembatasan dan tidak ada diskriminasi.

Disisi lain amanat dari **Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 berbunyi**: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dan **Pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 berbunyi** : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meratifikasi *Convention of the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention of the Rights of Persons with Disabilities*).

Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa negara-negara pihak harus melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas, sehingga berimplikasi perlunya melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas.

Dan akhirnya pada hari Kamis 17 Maret 2016 DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang tersebut diutamakan dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi dengan memberikan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara.

Demikian juga di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah mengesahkan Peraturan Daerah setelah ratifikasi yaitu dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah merupakan harmonisasi

peraturan perundangan di daerah dan menguatkan adanya tanda "pergeseran paradigma" dalam sikap dan pendekatan untuk Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Peraturan Daerah DIY mempunyai keterbatasan dalam merumuskan materi regulasi yang akan diterapkan di Kabupaten karena terkait dengan pembagian urusan/ kewenangan Pemerintah DIY (Provinsi) dan Pemerintah Kabupaten. Di samping itu, penyusunan regulasi di Kabupaten terkait Penyandang Disabilitas mempunyai pertimbangan strategis. Terdapat keragaman kebutuhan dan persoalan yang dihadapi Penyandang Disabilitas di Kabupaten/kota sehingga memerlukan strategi dan pendekatan kebijakan yang lebih spesifik antara lain;

- Pusat Sumber Pendidikan Inklusif seperti tercantum dalam pasal 17 adalah Lembaga yang menjadi sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif guna memperlancar, memperluas, meningkatkan kualitas, dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- Pusat Sumber Pendidikan Inklusif merupakan lembaga non struktural yang bersifat ad hoc yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan inklusif.
- Pusat Sumber Pendidikan Inklusif mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- Pusat Sumber Pendidikan Inklusif mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana pendidikan inklusif;
 - b. memberikan masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan inklusif terkait modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel;
 - c. menyelenggarakan layanan dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - d. menyediakan data tentang sistem layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam sistem inklusif;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan di Kabupaten/Kota;
 - f. menjalin kemitraan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan Kabupaten/Kota, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau lembaga lain yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah masing-masing;

- g. memberikan fasilitasi pendampingan proses pembelajaran dan pengelolaan kelembagaan kepada penyelenggara pendidikan inklusif;
 - h. menyediakan layanan konsultasi pendidikan khusus bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
 - i. menyediakan layanan assesment bagi penyandang disabilitas; dan
 - j. menyusun laporan kegiatan setiap 1 (satu) tahun dan disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan inklusif.
- Pengaturan mengenai Kuota dalam Hak Pekerjaan tercantum dalam Pasal 30 dan 31 Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas ini bahwa " Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (duapersen) Penyandang Disabilitas", kami memandang perlu dikaji lebih mendalam dikarenakan hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi akan ada sanksi pidana serta belum jelas siapa yang akan diberi sanksi pidana. Pengaturan kuota ini diatur sebelumnya dalam Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 53; bahwa (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dan ayat (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Namun tidak ada dalam pengaturan di Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sedangkan dalam Perda No.4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas tercantum pasal 30; Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan kuota paling sedikit 1% (satu persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil. Dan pasal 31 bahwa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pemenuhan kuota paling kurang 1% (satu persen) tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang. Kemudian dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat ditetapkan bahwa "Pengusaha harus mempekerjakan sekurang kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya".
 - Pengaturan mengenai pendataan / statistik dan pengumpulan data penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ini diatur dalam bagian Hak Pendataan memerlukan kajian atau pembahasan lebih lanjut dikarenakan data penyandang disabilitas adalah data-sektor yang menurut Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor